

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **INSPEKTORAT**

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai wujud nyata komitmen terhadap akuntabilitas pelaksanaan visi, misi, serta tugas dan fungsi organisasi kepada masyarakat. Penyusunan laporan ini dilakukan secara tahunan, sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintahan, serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini mencerminkan pencapaian kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan laporan ini didasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 dan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026. Setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan peran aktif Dinas dalam mendukung terciptanya *good governance*, dengan nilai-nilai *BerAKHLAK* sebagai dasar utama dalam setiap langkahnya.

Pencapaian yang diraih Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih dari itu, laporan ini diharapkan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2025, sekaligus sebagai alat pemacu semangat untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi di tahun-tahun mendatang. Peningkatan ini mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, serta pelaksanaan program yang dilandasi oleh semangat pelayanan prima (*Berorientasi Pelayanan*), transparansi dan tanggung jawab (*Akuntabel*), profesionalisme (*Kompeten*), kerja sama yang harmonis

(*Harmonis*), kesetiaan terhadap tugas dan organisasi (*Loyal*), kemampuan adaptasi terhadap perubahan (*Adaptif*), dan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak (*Kolaboratif*).

Dengan berlandaskan nilai-nilai *BerAKHLAK*, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus menghadirkan kinerja yang unggul dan berintegritas, guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berkualitas, sekaligus mendorong terciptanya sinergi antar pemangku kepentingan dalam memajukan Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2026

Kepala Dinas



ARMIZOPRADES, ST.MT

Pembina Tk.1(IV/b)

NIP. 19751201 200604 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi	9
1.4 Sumber Daya Manusia	10
1.5 Aspek Strategis Organisasi.....	12
1.6 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>) yang dihadapi Organisasi.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Tujuan dan Sasaran.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	18
Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:	18
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	19
3.3 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	20
A. Sasaran Meningkatnya Kemantapan Jalan	20
B. Sasaran Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak.....	35
C. Sasaran Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak.....	43
D. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis.....	51
E. Sasaran Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	60
F. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	66
G. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	73
BAB IV PENUTUP.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Dinas BMCKTR tahun 2024	10
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Berdasarkan tingkat pendidikan	10
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	11
Tabel 2. 1 Peran Strategis Dinas BMCKTR dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026	16
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas BMCKTR Tahun 2025 ...	17
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kerja.....	18
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Dinas BMCKTR Tahun 2025	19
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan.....	21
Tabel 3. 4 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumbar Tahun 2025	22
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Rasio Kemantapan Jalan Terhadap tahun Sebelumnya	28
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kemantapan Jalan s/d tahun 2025 terhadap Renstra 2021-2026.....	29
Tabel 3. 7 Perbandingan Kemantapan Jalan Provinsi Sumbar dengan Provinsi Riau Tahun 2025	
Tabel 3. 8 Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	33
Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Akses Air Minum Layak tahun 2025.....	36
Tabel 3. 10 Akses Air Minum Layak di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	36
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Akses Air Minum Layak dengan tahun sebelumnya	38
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Akses Air Minum Layak s/d tahun 2025 Terhadap Target Renstra	39
Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Akses Air Minum Layak Provinsi sumbar dengan Provinsi Sumsel	39

Tabel 3. 14	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Meningkatkan Cakupan Air Minum Layak.....	42
Tabel 3. 15	Capaian Akses Sanitasi Layak Tahun 2025.....	43
Tabel 3. 16	Realisasi Kinerja & Capaian Akses Sanitasi Layak tahun 2023 s/d 2025.....	47
Tabel 3. 17	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Akses Sanitasi Layak s/d Tahun 2025 Terhadap Rentsra	48
Tabel 3. 18	Perbandingan Realisasi Persentase Akses Sanitasi Dengan Provinsi Sumatera Selatan	48
Tabel 3. 19	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Meningkatkan Cakupan Sanitasi Layak.....	50
Tabel 3. 20	Capaian Indikator Persentase Bangunan Strategis Terbangun di Sumatera Barat Tahun 2025	53
Tabel 3. 21	Realisasi Kinerja & Capaian Presentase Bangunan Strategis Terbangun tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya.....	54
Tabel 3. 22	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Bangunan Strategis Terbangun s/d 2025 Terhadap Renstra	56
Tabel 3. 23	Realisasi Anggaran Pendukung Indikator Presentase Bangunan Strategis Terbangun.....	58
Tabel 3. 24	Capaian Kinerja Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi Tahun 2025	60
Tabel 3. 25	Kesesuaian Penggunaan Lahan Tahun 2024 Dengan Rencana Pola Ruang Rtrw	61
Tabel 3. 26	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2021 - 2026	63
Tabel 3. 27	Realisasi anggaran Pendukung Sasaran Meningkatkan kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang ..	65
Tabel 3. 28	Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	67
Tabel 3. 29	Hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025	68
Tabel 3. 30	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	68

Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas s/d 2024 Terhadap Renstra 2021 - 2026.....	69
Tabel 3. 33 Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	72
Tabel 3. 34 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.....	73
<i>Tabel 3. 35 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.....</i>	<i>74</i>
Tabel 3. 36 Realisasi Kinerja & Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi terhadp tahun sebelumnya	74
Tabel 3. 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap	76
Tabel 3. 39 Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas BMKCTR Provinsi Sumatera Barat 9	
Gambar 1. 2 Grafik Persentase Jumlah Pegawai.....	10
Gambar 3. 1 Grafik Perbandingan Capaian Indikator Rasio Kemantapan Jalan dengan tahun sebelumnya	28
Gambar 3. 2 Grafik Kondisi Kemantapan jalan tahun 2020 - 2025.	30
Gambar 3. 3 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Akses Air Minum Layak dengan tahun sebelumnya	38
Gambar 3. 4 Grafik Cakupan Air Minum Layak Tahun 2021-2025..	40
Gambar 3. 5 Grafik Capaian Kinerja Akses Sanitasi Layak.....	47
Gambar 3. 6 Perkembangan Akses Sanitasi Layak Tahun 2021 - 2025	49
Gambar 3. 7 Grafik Perbandingan Capaian Indikator Persentase Bangunan Strategis Terbangun tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya.....	55
Gambar 3. 8 Perkembangan Indikator Persentase Bangunan Strategis Terbangun	57
Gambar 3. 9 Capaian Presentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi	62
Gambar 3. 10 Capaian indikator Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi dalam lima (5) tahun	63
Gambar 3. 11 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	69
Gambar 3. 12 Grafik Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2021-2025	70
Gambar 3. 13 Realisasi Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi terhadap tahun sebelumnya	75
Gambar 3. 14 Grafik Perkembangan Indikator lima tahun terakhir .	76

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021–2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025. Penyusunan laporan ini adalah wujud komitmen terhadap akuntabilitas publik serta implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana diamanatkan oleh Tap MPR No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pada tahun 2025, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis untuk mendukung pencapaian visi “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” yang sejalan dengan visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan alokasi dana melalui APBD-P sebesar Rp 345.271.529.767,- realisasi anggaran mencapai Rp 326.785.163.129,- (94,64%), mencakup 9 program, 19 kegiatan, dan 103 subkegiatan.

Pagu Dana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

No.	Uraian	Rencana	Realisasi	Sisa	%
1.	Belanja Langsung	345.271.529.767,-	326.785.163.129,-	18.486.366.638,-	94,64

Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi langsung terhadap indikator kinerja strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hasil pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya mencerminkan upaya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan tetapi juga mewujudkan peningkatan

kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab.

**Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
BMCKTR Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025	REALIASI TAHUN 2025
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB 72.00	BB 70.52
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Organisasi	85.25%	87%
3.	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio kemantapan jalan	71.00%	71.15%
4.	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	88.00%	88.56%
5.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Layak	88.00%	86.79%
6.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Presentase Bangunan Strategis terbangun	11.11%	16.67%
7.	Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan Berkelanjutan	Presentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi	89.70%	89.70%

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur dengan Nomor 50 Tahun 2020 sebelumnya yang bernama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat awalnya merupakan bagian dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjal Tarkim). Setelah Perda Nomor 8 tahun 2016 diterbitkan maka Dinas Prasjal Tarkim dipecah menjadi 2 (dua) dinas yaitu Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan). sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun - 2 - 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pergub Nomor: 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah diketahui bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan dinas daerah tipe B yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah.
- 2) Penyelenggaraan Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang).

- 3) Penyelenggaraan Administrasi Dinas.
- 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang).
- 5) Pelaksanaan fungsi lain oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi dinas dengan fungsinya masing-masing.

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Penyelenggaraan Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang).
- c. Penyelenggaraan Administrasi Dinas.
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang).
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh pimpinan.

2) Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam urusan ketatausahaan, penganggaran, data/informasi, keuangan, kepegawaian, aset, arsip dan tata laksana organisasi serta pembinaan/pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyelenggaraan penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan di lingkungan Dinas;

- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan tata kearsipan, urusan kerumahtanggaan
- e. Dinas, ketatausahaan dan humas rumah tangga Dinas;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan dan penataan barang milik daerah;
- h. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas yang
- i. Menjadi tanggung jawab Dinas;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. Penyelenggaraan pengelolaan data, informasi publik dan dokumentasi Berbasis komputerisasi/web;
- l. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, program pekerjaan, pelaksanaan Pembangunan dan preservasi jalan/jembatan, pengamanan bagian – bagian jalan/jembatan, pengawasan/pengendalian mutu dan hasil pekerjaan serta penyediaan pengujian dan peralatan. Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Marga;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi serta leger jalan/jembatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi serta leger jalan/jembatan;

- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan/preservasi jalan/jembatan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pembangunan/preservasi jalan/jembatan dengan kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi serta leger jalan/jembatan;
- g. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan, rekomendasi pemberian izin utilitas pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;
- h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem drainase, sistem air limbah dan persampahan regional. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Cipta Karya;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional;
- c. Melaksanakan kebijakan pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan, pengembangan

- sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional;
- d. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan keciptakaryaan;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pembangunan Bidang Cipta Karya dengan Kabupaten/Kota;
 - f. Melaksanakan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan pembangunan Bidang Cipta Karya;
 - g. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur Pembangunan Bidang Cipta Karya pada kawasan strategis provinsi;
 - h. Penyelenggaraan pemberian bantuan teknis terhadap perangkat daerah yang melakukan pembangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
 - i. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan rumah negara;
 - j. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan program kerja, anggaran dan rumusan kebijakan bidang Tata Ruang;
- b. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

- c. Penyelenggaraan pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Penyelenggaraan kerjasama penataan ruang antar provinsi dan fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan pembentukan Forum Penataan Ruang;
- g. Pelaksanaan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan kebijakan bidang Tata Ruang; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6) UPTD Laboratorium dan Bahan Konstruksi (LBK)

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi terdiri atas :

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengujian Mutu Bahan
- d. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian mutu bahan/konstruksi.

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional pengujian bahan/mutu konstruksi.
- b. Pelaksanaan pengelolaan, pengaturan, pemanfaatan, pemakaian alat-alat laboratorium untuk pengujian bahan/mutu konstruksi.
- c. Pelaksanaan operasional layanan pengujian pada masyarakat dan pihak ketiga sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi.

- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk PAD Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Pelaksanaan operasional tugas kedinasan sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi.
- f. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan UPTD.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7) UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung (P2BG)

Susunan organisasi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung terdiri dari :

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- d. Seksi Layanan Data dan Informasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung. UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- c. Pelaksanaan operasional pelayanan pada masyarakat bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- d. Pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8) UPTD Workshop dan Peralatan

Susunan organisasi UPTD Workshop dan Peralatan terdiri :

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan
- d. Seksi Workshop dan Perbekalan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang penyiapan peralatan, bahan jalan/jembatan, perbengkelan, layanan gangguan dan pembinaan peralatan. UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pengaturan, pemanfaatan dan pemakaian asset kekayaan daerah berupa peralatan penunjang untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- b. Pelaksanaan pemeliharaan dan operasional peralatan.
- c. Pelaksanaan pekerjaan layanan gangguan pada jalan/jembatan akibat bencana alam.
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas sewa peralatan untuk PAD.
- e. Pelaksanaan teknis standard administrasi dan operasional peralatan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I – VI

Susunan organisasi UPTD Jalan Jembatan Wilayah I-VI terdiri dari :

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Jalan dan Jembatan I
- d. Seksi Jalan dan Jembatan II
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program/anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin dan berkala serta

pengendalian/evaluasi hasil pemeliharaan teknis jalan dan jembatan. UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan program kegiatan dan anggaran pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan
- b. Penyelenggaraan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/kota atas pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- e. Pemberian bantuan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang membutuhkan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

10) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

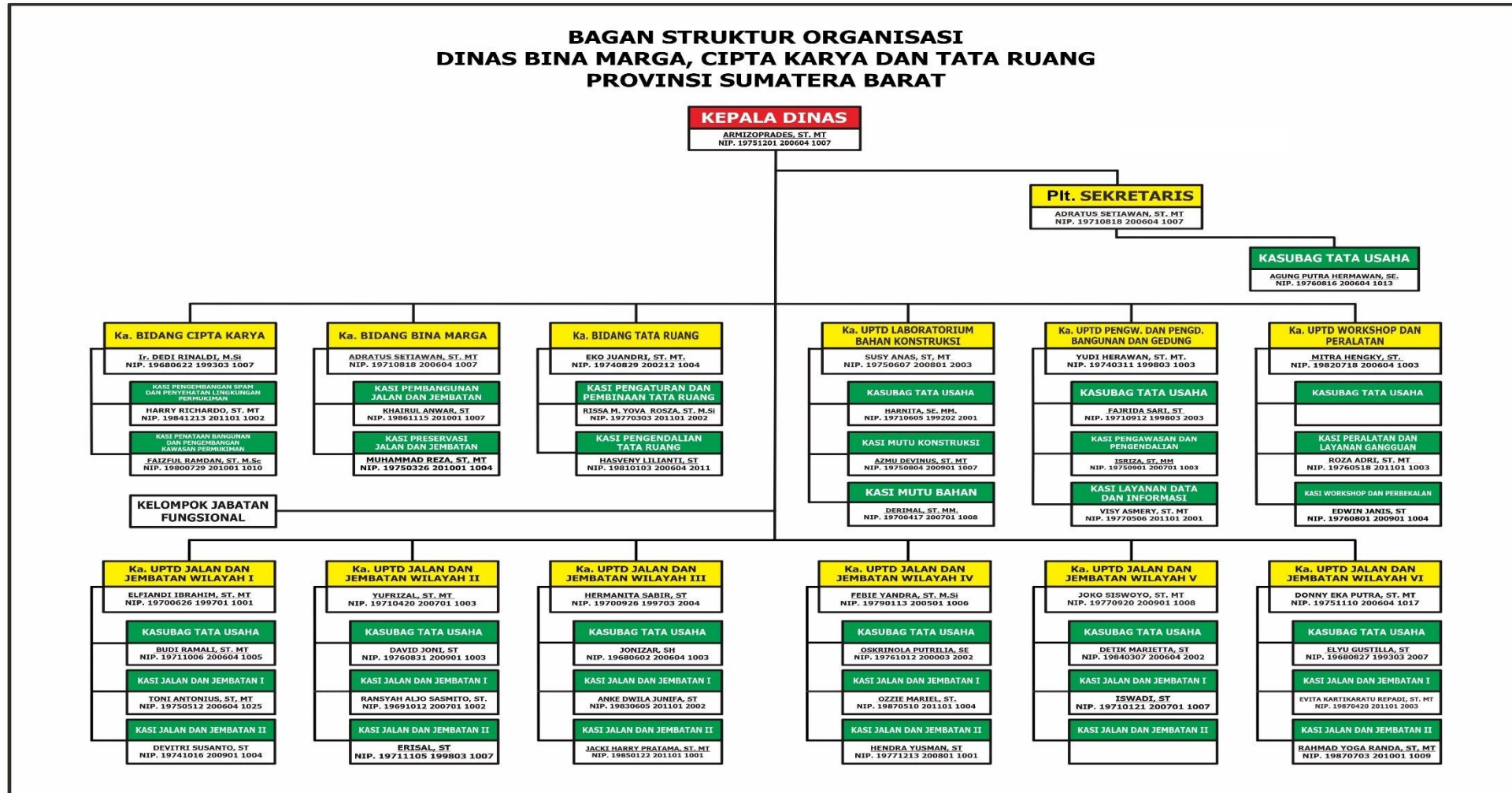
1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 ditampilkan pada *Gambar 1.1*. Dari struktur organisasi dapat dijelaskan bahwa formasi tenaga struktural pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2025 terdiri dari :

1. Kepala Dinas : Eselon II (1 orang)
2. Sekretaris : Eselon III (1 orang)
3. Kepala Bidang : Eselon III (3 orang)

- 4. Kepala UPTD : Eselon III (9 orang)
- 5. Kepala Seksi : Eselon IV (27 orang)
- 6. Kasubag : Eselon IV (11 orang)

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas BMKCTR Provinsi Sumatera Barat

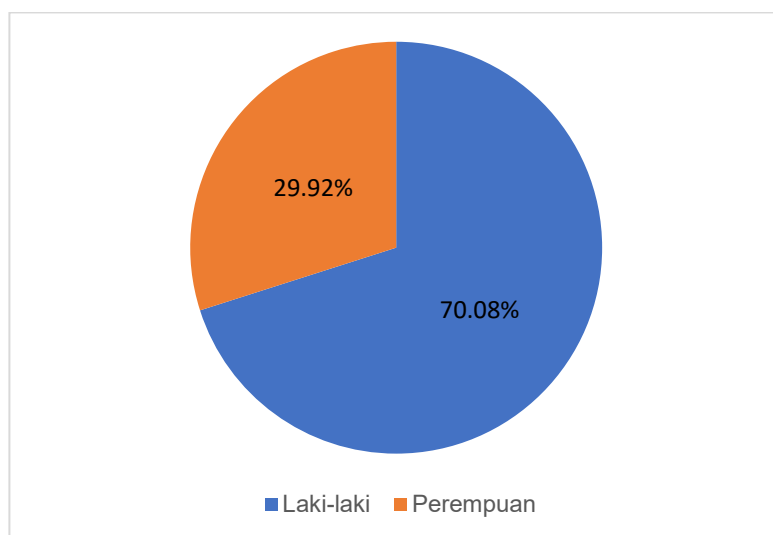


1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pada akhir tahun 2025 adalah **391 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu) orang** Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan jenis kelamin pemetaan pegawai pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar ditampilkan pada **Tabel 1.1**.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Dinas BMCKTR tahun 2025

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	274	70,08 %
Perempuan	117	29,92 %



Gambar 1. 2 Grafik Persentase Jumlah Pegawai

Pemetaan pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikan dan Golongannya ditampilkan pada **Tabel 1.2** dan **Tabel 1.3**.

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	4	0	4
SLTP Sederajat	6	0	6
SLTA Sederajat	103	9	112
DIII	30	19	49

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
DIV	2	0	2
S1	95	64	159
S2	34	24	58
S3	0	1	1
Jumlah	274	117	391

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1a	2	0	2
1b	3	0	3
1c	0	0	0
1d	2	0	2
2a	42	3	45
2b	3	0	3
2c	12	10	22
2d	26	5	31
3a	76	31	107
3b	28	15	43
3c	32	19	51
3d	30	25	55
4a	15	9	24
4b	3	0	3
4c	0	0	0
4d	0	0	0
4e	0	0	0
Jumlah	274	117	391

1.5 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, air minum, air limbah, pembangunan gedung atau bangunan negara serta penataan ruang. Infrastruktur Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Hal tersebut dilakukan dengan cara pembangunan dan peningkatan pada jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir, meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan yang ada.

Disamping itu, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang layak di Provinsi Sumatera Barat. Peran strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang lainnya adalah pembangunan gedung negara, shelter dan bangunan lainnya dalam rangka rekonstruksi bangunan yang ada di Sumatera Barat.

Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Adapun program-program Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan misi Gubernur yaitu Mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas BMCKTR dapat mengurangi kesenjangan antar

kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan Pembangunan.

1.6 Permasalahan Utama (*Strategic Issues*) yang dihadapi Organisasi

Pembangunan Sumatera Barat telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani segera melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan. Di bidang infrastruktur, Sumatera Barat menghadapi tantangan untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang andal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah salah satu OPD yang terlibat langsung dalam permasalahan infrastruktur yang ada di Sumatera Barat.

Permasalahan utama terkait infrastruktur salah satunya adalah upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah masih terkendala. Penyebabnya adalah (1) masih terdapat jalan yang belum terhubung antar wilayah dan terisolir karena faktor pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran.

Disamping itu, upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa akses air minum dan sanitasi layak juga masih mengalami berbagai kendala, antara lain (1) masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat (2) Keterbatasan ketersediaan sumber air baku di kabupaten/kota. (3) kesulitan penyediaan lahan karena terkendala pembebasannya sesuai dengan kriteria pembangunan infrastruktur dan (4) Terbatasnya ketersediaan dana pembangunan.

Hal serupa, dibidang Penataan Ruang terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan terutama pemanfaatan ruang (2) rendahnya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang, terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang dan upaya memasyarakatkannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Dalam misi RPJMD tersebut dinyatakan bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan OPD yang memiliki peran strategis dan tanggungjawab untuk mendukung pencapaian misi 6 (enam) Gubernur Sumatera Barat yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan”. Misi 6 (enam) ini memiliki tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata memiliki 5 (lima) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi
2. Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
4. Meningkatkan infrastruktur, pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.

Dari 5 (lima) sasaran tersebut Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Barat berada pada sasaran:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi
2. Meningkatkan infrastruktur, pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
3. Meningkatkan penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan

Melalui sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, Dinas Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan, yaitu:

1. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Pelayanan Dasar dan Bangunan Gedung Strategis
4. Meningkatkan penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan

Adapun sasaran yang perlu dicapai demi tercapainya tujuan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dan meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi.
2. Meningkatnya kemantapan jalan.
3. Meningkatnya cakupan air minum layak, meningkatnya cakupan sanitasi layak, dan meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung strategis.
4. Mewujudkan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.

Dalam implementasinya, indikator tujuan dan indikator sasaran pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menggunakan indikator yang sama.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut.

Tabel 2. 1 Peran Strategis Dinas BMCKTR dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026

VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan				
MISI 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan				
Tujuan Kepala Daerah	Sasaran Kepala Daerah	Tujuan Perangkat Daerah		Sasaran Perangkat Daerah
Tewujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Terintegrasi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	1	Meningkatnya kemantapan jalan
	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar dan bangunan gedung strategis	1	Meningkatnya cakupan air minum layak
			2	Meningkatnya cakupan sanitasi layak
			3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung strategis.
	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Meningkatkan penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan	1	Mewujudkan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
		Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
			2	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas BMCKTR Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB 72.00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	85.25%
3	Meningkatnya kemantapan jalan	Rasio Kemantapan Jalan	71.00%
4	Meningkatnya cakupan air minum layak	Akses Air Minum Layak	88.00%
5	Meningkatnya cakupan sanitasi layak	Akses Sanitasi Layak	88.00%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung strategis	Persentase bangunan strategis terbangun	11.11 %
7	Mewujudkan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi	89.70%

No.	PROGRAM	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Propinsi	63.111.792.279	57.090.381.954	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.814.502.000	679.938.248	APBD
3	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	1.526.515.000	1.712.654.800	APBD
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	853.424.000	677.149.125	APBD
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.770.000		APBD
6	Program Penataan Bangunan Gedung	59.382.364.995	39.164.362.561	APBD
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	4.050.644.739	3.608.785.018	APBD
8	Program Penyelenggaraan Jalan	286.704.615.510	241.464.868.800	APBD/ APBN
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.430.155.221	873.389.261	APBD
JUMLAH		420.878.783.744	345,271,529,767	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) pada tahun 2025, ada 7 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja atas 7 Sasaran dan 7 Indikator Kinerja Dinas BMCKTR Sumatera Barat menunjukkan Rata – Rata Capaian Realisasi Kinerja Sebesar 110% dengan Capaian terbesar pada Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis sebesar 185.17%

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Dinas BMCKTR Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB 72,00	BB 70,52	97,94%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	85,25%	87,00%	120,83%
3.	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	71,00%	71,10%	100,14%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	88,00%	88,56%	100,64%
5.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi layak	88,00%	88,11%	100,13%
6.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Presentase Bangunan Strategis Terbangun	11,11 %	16,67%	150,04%
7.	Mewujudkan Penataan Ruang Yang Baik Dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan Dengan Program RTRW Provinsi	89,70%	88,62%	98,80%
Rata - Rata Capaian					109,79%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas BMCKTR pada tahun 2025 berhasil mencapai bahkan melampaui sebagian besar target yang ditetapkan.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Guna melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada analisis berikut :

A. Sasaran Meningkatnya Kemantapan Jalan

Kemantapan jalan merupakan indikator dalam penanganan jalan yang mengacu pada kualitas fisik dan layanan jalan yang memenuhi syarat minimal agar suatu ruas jalan dapat berfungsi secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan kemantapan jalan ditetapkan sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang untuk mendukung tujuan *“Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata”* sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat.

Pada tahun 2025, Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat menetapkan target kemantapan jalan sebesar 71% disusun berdasarkan realisasi capaian tahun sebelumnya, yang semula 79% berdasarkan Rencana Startegis 2021 – 2026,. Pada tahun 2025, realisasi kemantapan jalan mencapai 71,10% dengan klasifikasi penilaian dapat dikategorikan “**Sangat Tinggi**” , sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	71%	71,10%	100,14%

Indikator Kinerja Rasio Kemantapan Jalan didapatkan dari laporan hasil survey IRMS yang telah dilakukan terhadap Sepanjang 1690.50 Km Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 620 – 357 - 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, diperoleh bahwa Rasio Kemantapan Jalan provinsi pada Tahun 2025 sebesar 71,10 dimana secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Kemantapan Jalan} &= \frac{\text{Total Panjang Jalan Mantap Per Ruas (Km)}}{\text{Total Panjang Jalan Provinsi (Km)}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik + Sedang (Km)}}{\text{Total Panjang Jalan Provinsi (Km)}} \times 100\% \\
 &= \frac{1202,01 \text{ Km}}{1690,50 \text{ Km}} \times 100\% \\
 \text{Rasio Kemantapan Jalan} &= 71,10\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3. 4 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumbar Tahun 2025

Balai Name/Link	Ruas Jalan	Panjang Survei (km)	Beton (km)	Blok Beton (km)	Aspal (km)	Lapen (km)	Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)	Jalan Mantap (km)	Jalan Tidak Mantap (km)	Jalan Mantap (%)	Jalan Tidak Mantap (%)
		1,690.50	49.18	0.00	1,306.76	0.00	980.45	221.57	121.89	32.04	1,202.01	153.93	71.10%	9.1%
007	Simancung - Tanjung Ampalu	10.62	0.15	0.00	10.47	0.00	6.17	3.75	0.70	0.00	9.92	0.70	93.4%	6.6%
008	Tanjung Ampalu - Sinjunjung	20.00	0.50	0.00	19.50	0.00	13.90	4.90	1.20	0.00	18.80	1.20	94.0%	6.0%
010	Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru	29.00	0.16	0.00	28.84	0.00	18.80	5.40	3.10	1.70	24.20	4.80	83.4%	16.6%
011	Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu	11.90	0.00	0.00	11.90	0.00	6.10	3.70	1.60	0.50	9.80	2.10	82.4%	17.6%
012	Simp. Koto Baru - Junction	5.40	0.00	0.00	5.40	0.00	4.50	0.50	0.40	0.00	5.00	0.40	92.6%	7.4%
018	Inderapura - Muara Sakai	7.30	0.00	0.00	7.30	0.00	6.60	0.40	0.30	0.00	7.00	0.30	95.9%	4.1%
025	Manggopoh - Padang Luar	69.43	0.00	0.00	69.43	0.00	42.53	15.20	11.50	0.20	57.73	11.70	83.1%	16.9%
028	Sicincin - Kurai Taji	16.44	0.00	0.00	16.44	0.00	8.94	5.00	2.40	0.10	13.94	2.50	84.8%	15.2%
031	Panti - Simpang Empat	74.23	0.00	0.00	74.23	0.00	47.83	16.90	9.50	0.00	64.73	9.50	87.2%	12.8%
033.1	Simpang Empat - Sasak	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	12.10	7.30	0.60	0.00	19.40	0.60	97.0%	3.0%
033.2	Sasak - Maligi	21.20	3.00	0.00	4.65	0.00	3.45	1.50	0.30	2.40	4.95	2.70	64.7%	35.3%
034	Air Balam - Air Bangis	12.60	0.00	0.00	12.60	0.00	12.50	0.10	0.00	0.00	12.60	0.00	100.0%	0.0%
035	Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang)	18.50	0.00	0.00	18.50	0.00	6.60	8.40	3.50	0.00	15.00	3.50	81.1%	18.9%
036	Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa)	28.50	0.00	0.00	28.50	0.00	13.90	6.50	7.30	0.80	20.40	8.10	71.6%	28.4%
037	Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	10.40	0.00	0.00	10.40	0.00	5.50	2.80	2.00	0.10	8.30	2.10	79.8%	20.2%
038	Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga)	29.60	2.33	0.00	27.27	0.00	19.57	7.61	2.42	0.00	27.18	2.42	91.8%	8.2%
039	Guguk Cino - Sitangkai	14.70	0.00	0.00	14.70	0.00	4.10	6.30	4.00	0.30	10.40	4.30	70.7%	29.3%
040	Sitangkai - Tanjung Ampalu	17.50	0.00	0.00	17.50	0.00	5.60	6.40	5.40	0.10	12.00	5.50	68.6%	31.4%
044	Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai	44.00	2.87	0.00	41.13	0.00	28.97	7.30	4.10	3.63	36.27	7.73	82.4%	17.6%
054	Junction - Abai Siat (Bts. Jambi)	12.60	0.00	0.00	12.60	0.00	12.40	0.20	0.00	0.00	12.60	0.00	100.0%	0.0%

Balai Name/Link	Ruas Jalan	Panjang Survei (km)	Beton (km)	Blok Beton (km)	Aspal (km)	Lapen (km)	Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)	Jalan Mantap (km)	Jalan Tidak Mantap (km)	Jalan Mantap (%)	Jalan Tidak Mantap (%)
055	Sijunjung - Tanah Badantung	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	2.90	1.30	0.20	0.00	4.20	0.20	95.5%	4.5%
056.1	Simp. Padang Aro - Lubuk Malako	20.00	2.00	0.00	18.00	0.00	14.90	4.10	1.00	0.00	19.00	1.00	95.0%	5.0%
056.2	Lubuk Malako - Abai Sangir	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	7.30	6.70	3.00	0.00	14.00	3.00	82.4%	17.6%
056.3	Abai Sangir - Sei. Dareh	73.65	0.40	0.00	26.45	0.00	18.75	4.30	3.30	0.50	23.05	3.80	85.8%	14.2%
068	Padang Sawah - Kumpulan	36.50	0.00	0.00	36.50	0.00	29.50	4.10	2.90	0.00	33.60	2.90	92.1%	7.9%
069.1	Bts. Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	42.75	0.00	0.00	42.64	0.00	36.87	4.18	1.30	0.30	41.04	1.60	96.2%	3.8%
069.2	Sp. Pua Data - Sp. Sei Dadok - Museum PDRI	5.17	0.00	0.00	5.17	0.00	1.87	0.80	1.50	1.00	2.67	2.50	51.6%	48.4%
070	Batu Sangkar - Ombilin	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	6.90	2.50	7.30	0.30	9.40	7.60	55.3%	44.7%
071	Solok - Alahan Panjang	46.80	0.00	0.00	46.80	0.00	33.30	8.90	4.50	0.10	42.20	4.60	90.2%	9.8%
072	Lubuk Basung - Sungai Limau	28.60	0.00	0.00	28.60	0.00	23.90	3.70	0.90	0.10	27.60	1.00	96.5%	3.5%
073	Pasar Baru - Alahan Panjang	44.95	0.00	0.00	44.95	0.00	42.55	0.80	1.40	0.20	43.35	1.60	96.4%	3.6%
075	Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman	22.50	0.00	0.00	22.50	0.00	22.10	0.40	0.00	0.00	22.50	0.00	100.0%	0.0%
076	Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur	73.95	5.41	0.00	54.09	0.00	52.47	4.82	1.23	0.98	57.29	2.21	96.3%	3.7%
078	Simp. Koto Mambang - Balingka	39.40	0.30	0.00	39.10	0.00	33.40	1.00	0.30	4.70	34.40	5.00	87.3%	12.7%
079	Simp. Baso - Piladang	10.50	0.47	0.00	10.02	0.00	7.45	1.80	1.25	0.00	9.25	1.25	88.1%	11.9%
080	Matur - Palembang	20.70	0.25	0.00	20.45	0.00	13.68	4.20	2.32	0.50	17.88	2.82	86.4%	13.6%
081	Palembayan - Palupuh (Simp. Patai)	13.30	0.10	0.00	13.20	0.00	12.00	0.80	0.50	0.00	12.80	0.50	96.2%	3.8%
082.1	Alahan Panjang - Kiliran Jao	94.00	1.45	0.00	18.15	0.00	9.80	5.80	4.00	0.00	15.60	4.00	79.6%	20.4%
082.2	Simp. Sikundua - Garabak	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
083.1	Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	44.10	0.00	0.00	44.10	0.00	43.20	0.10	0.80	0.00	43.30	0.80	98.2%	1.8%
083.2	Gerbang Teluk Kabung - Mandeh	0.52	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	100.0%	0.0%

LKJIP 2025

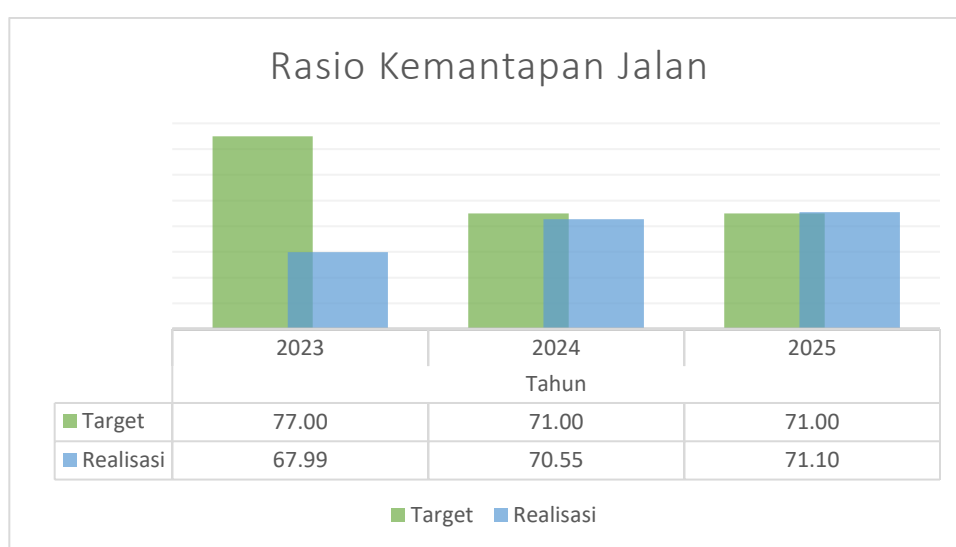
Balai Name/Link	Ruas Jalan	Panjang Survei (km)	Beton (km)	Blok Beton (km)	Aspal (km)	Lapen (km)	Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)	Jalan Mantap (km)	Jalan Tidak Mantap (km)	Jalan Mantap (%)	Jalan Tidak Mantap (%)
083.3	Pelabuhan TPI Carocok - Tarusan	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.90	0.20	0.00	0.00	1.10	0.00	100.0%	0.0%
084	Jalan Lingkar Selatan - Bts. Payakumbuh	7.98	0.00	0.00	7.98	0.00	2.58	3.70	1.70	0.00	6.28	1.70	78.7%	21.3%
085	Balai Panjang - Sp. Pdg Karambia - Tj. Bungo (TPA)	5.00	2.50	0.00	2.50	0.00	3.00	1.40	0.50	0.10	4.40	0.60	88.0%	12.0%
086	Surantiah - Kayu Aro - Langgai	29.30	3.36	0.00	13.10	0.00	11.65	3.10	1.30	0.40	14.75	1.70	89.7%	10.3%
087	Duku - Sicincin	20.58	0.00	0.00	2.90	0.00	2.70	0.20	0.00	0.00	2.90	0.00	100.0%	0.0%
088	Padang Koto Gadang - Palembang	31.00	0.20	0.00	30.80	0.00	25.40	3.50	2.00	0.10	28.90	2.10	93.2%	6.8%
090	Palupuh - Puagadiah - Koto Tinggi	25.00	2.03	0.00	16.94	0.00	11.27	4.78	1.94	0.99	16.05	2.93	84.6%	15.4%
091	Smp. Napar - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	14.65	0.03	0.00	9.16	0.00	4.70	2.49	1.50	0.50	7.19	2.00	78.2%	21.8%
092	Simp. Ganting - Bts Tanah Datar - Sumani	32.80	0.00	0.00	32.80	0.00	30.40	2.30	0.10	0.00	32.70	0.10	99.7%	0.3%
093	Singkarak - Aripin - Tj. Balit - Padang Ganting	38.75	1.09	0.00	37.10	0.00	27.75	7.60	2.10	0.74	35.35	2.84	92.6%	7.4%
094	Pintu Angin - Labuah Saiyo	5.61	0.00	0.00	5.61	0.00	3.61	1.30	0.70	0.00	4.91	0.70	87.5%	12.5%
095	Rao - Rokan (Batas Riau)	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	27.20	5.30	0.50	0.00	32.50	0.50	98.5%	1.5%
096	Lb Sikaping (Simp. Daliak) - Talu (Simp. Gantiang)	33.00	0.95	0.00	23.69	0.00	23.54	1.00	0.10	0.00	24.54	0.10	99.6%	0.4%
097	Bungo Tanjung - Teluk Tapang	43.20	0.15	0.00	34.73	0.00	34.58	0.20	0.10	0.00	34.78	0.10	99.7%	0.3%
098	Teluk Bayur - Nipah - Purus	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	11.70	0.10	0.20	0.00	11.80	0.20	98.3%	1.7%
099	Purus - Bandara International Minangkabau	16.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	100.0%	0.0%
100	Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.0%	0.0%
101	Simp. Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	47.00	0.40	0.00	33.20	0.00	22.07	1.60	2.53	7.40	23.67	9.93	70.4%	29.6%
102	Rawang - Talawi	12.90	2.19	0.00	8.26	0.00	7.41	1.79	0.50	0.75	9.20	1.25	88.0%	12.0%
103	Simp Sp II - Kantor Camat	5.10	4.12	0.00	0.00	0.00	3.22	0.10	0.80	0.00	3.32	0.80	80.6%	19.4%
104	Kantor Camat - Berkat	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	100.0%	0.0%

Balai Name/Link	Ruas Jalan	Panjang Survei (km)	Beton (km)	Blok Beton (km)	Aspal (km)	Lapen (km)	Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)	Jalan Mantap (km)	Jalan Tidak Mantap (km)	Jalan Mantap (%)	Jalan Tidak Mantap (%)
105	Bonjol - Suliki	20.80	0.80	0.00	2.20	0.00	0.50	1.00	0.90	0.60	1.50	1.50	50.0%	50.0%
106	Unggan - Pamusian - Tapi Selo	26.06	3.88	0.00	11.91	0.00	7.49	4.95	2.60	0.75	12.44	3.35	78.8%	21.2%
107	Tiku - Sasak	90.00	2.20	0.00	25.50	0.00	18.20	4.50	3.80	1.20	22.70	5.00	81.9%	18.1%
		1,690.50	49.18	0.00	1,306.76	0.00	980.45	221.57	121.89	32.04	1,202.01	153.93	71.1%	9.1%

Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu Indikator Rasio Kemantapan Jalan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Rasio Kemantapan Jalan Terhadap tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Rasio Kemantapan Jalan	77,00	71,00	71,00	71,40	70,55	71,10	88,29	99,37	100,14



Gambar 3. 1 Grafik Perbandingan Capaian Indikator Rasio Kemantapan Jalan dengan tahun sebelumnya

Grafik Rasio Kemantapan Jalan menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi selama periode tahun 2023–2025. Pada tahun 2023, target rasio kemantapan jalan ditetapkan sebesar 77,00%, namun realisasi yang dicapai hanya 67,99%, sehingga terdapat selisih cukup besar antara target dan capaian yang disebabkan oleh adanya penambahan Panjang jalan pada Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 620 – 357 - 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi . Namun, pada tahun 2024, terdapat perbaikan signifikan dengan realisasi mencapai 70,55%, hampir menyamai target 71%, dengan persentase capaian meningkat menjadi 99,37%. Selanjutnya, pada tahun 2025, target rasio kemantapan jalan tetap dipertahankan sebesar 71,00% dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun sebelumnya. Realisasi mencapai 71,10%, yang berarti capaian

kinerja telah melampaui target. Pencapaian ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan pemeliharaan serta peningkatan jalan telah berjalan dengan efektif.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan tren peningkatan kinerja rasio kemantapan jalan, dengan kesenjangan antara target dan realisasi yang semakin mengecil hingga akhirnya target berhasil dicapai dan dilampaui pada tahun 2025.

Untuk Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya kemantapan jalan dengan target akhir yang tertuang didalam Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kemantapan Jalan s/d tahun 2025 terhadap Renstra 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2025	TARGET s/d 2025	TARGET s/d 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	71,10%	81,00%	82,00%

Berdasarkan tabel, kinerja realisasi peningkatan kemantapan jalan hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa rasio kemantapan jalan yang terealisasi mencapai 71,10%. Namun, capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026, yaitu 81% untuk tahun 2025 yang kemudian target tersebut disesuaikan ditahun 2025 menjadi 71% dengan memperhatikan capaian tahun lalu. Sementara itu, target yang harus dicapai pada tahun 2026 adalah sebesar 82%. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk menjembatani kesenjangan antara realisasi dan target yang ditetapkan, agar sasaran peningkatan kemantapan jalan sesuai dengan Renstra dapat tercapai secara optimal.

Dalam rangka melakukan perbandingan Rasio Kemantapan Jalan dengan OPD sejenis dari provinsi lain, Dinas BMCKTR hingga saat ini belum memperoleh data pembanding yang relevan. Keterbatasan ketersediaan data lintas daerah tersebut menyebabkan analisis perbandingan eksternal belum dapat dilakukan

Pencapaian Indikator Kemantapan Jalan yang beragam dalam 5(lima) tahun terakhir juga dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 3. 2 Grafik Kondisi Kemantapan jalan tahun 2020 - 2025

Pada tahun 2021, realisasi kemantapan jalan tercatat sebesar 73,03%, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode pengamatan. Selanjutnya pada tahun 2022, nilai kemantapan jalan mengalami penurunan menjadi 71,40%, meskipun masih berada pada kategori relatif stabil. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana realisasi kemantapan jalan turun hingga 67,99% yang disebabkan oleh adanya penambahan Panjang jalan pada Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 620 – 357 - 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan.

Memasuki tahun 2024, realisasi kemantapan jalan kembali mengalami peningkatan menjadi 70,55%, menunjukkan adanya upaya pemulihan dan perbaikan kinerja. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025, dengan realisasi mencapai 71,10%, yang mencerminkan perbaikan kondisi jalan secara bertahap dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, grafik tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terjadi penurunan pada periode 2021–2023, kinerja kemantapan jalan pada tahun 2024–2025 menunjukkan tren pemulihan dan peningkatan, yang menandakan efektivitas upaya penanganan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan.

Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas BMCKTR telah melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan kemantapan jalan ditahun 2025 diantaranya adalah:

1. Membangun Jalan sepanjang 6,52 Km yang terbagi kedalam 7(delapan) ruas Jalan yaitu 1) Ruas Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (TPA Regional) (P.085) 2) Ruas Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086) 3) Ruas Pangkalan - Sialang - Gelugur (P.076) 4) Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082) 5) Ruas Sasak - Maligi (P.033.2) 6) Ruas Purus - BIM (P.099) 7) Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)
2. Melakukan Rekonsturksi Jalan 8,94 Km di 8 (delapan) ruas jalan 1) Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau (P.072) 2) Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako - Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056) 3) Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) 4) Ruas Jalan Simpang Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) 5) Ruas Jalan Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu (P.011) 6) Ruas Jalan Sijunjung - Tanah Badantung (P.055) 7) Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038) 8) Ruas Jalan Singkarak - Arian - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093) .
3. Melakukan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 1690,5 Km.
4. Melakukan rehabilitasi jalan sepanjang 9,38 Km dalam 18 Ruas Jalan Provinsi.

Selain Upaya – Upaya yang telah dilakukan oleh BMCKTR dalam meningkatkan kemantapan jalan juga terdapat beberapa faktor penghambat dalam menjaga kemantapan jalan antara lain:

1. Pendekatan Komprehensif dan Berjenjang :Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang menerapkan strategi terintegrasi, mulai dari pemeliharaan rutin dan berkala hingga rehabilitasi dan rekonstruksi total. Pendekatan ini dilengkapi dengan penanganan spesifik terhadap titik rawan, seperti longsor dan drainase buruk, yang disesuaikan dengan tantangan geografi dan geologi wilayah.

2. Penerapan Teknisi dan Sistem Manajemen Modern: Upaya peningkatan didukung oleh penerapan sistem manajemen aset jalan berbasis data (Road Asset Management System/RAMS) dan teknologi GIS, serta pengawasan konstruksi yang ketat. Hal ini memungkinkan perencanaan yang lebih prediktif, tepat sasaran, dan menjamin kualitas teknis pekerjaan sesuai standar.
3. Berorientasi pada Keberlanjutan dan Ketangguhan: Seluruh upaya teknis dirancang untuk menciptakan infrastruktur jalan yang tidak hanya andal di masa kini, tetapi juga tahan terhadap tantangan alam jangka panjang seperti curah hujan tinggi, kondisi tanah kompleks, dan beban lalu lintas yang meningkat. Komitmen ini bertujuan mendukung konektivitas, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.

Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui dinas BMCKTR juga melakukan upaya pencapaian dimasa yang akan datang terhadap Indikator kemantapan jalan diantaranya adalah :

1. Memaksimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan utilitas jalan (Telkom,PDAM,PLN).
2. Memaksimalkan perencanaan terhadap lokasi yang rawan bencana.
3. Mengupayakan sumber pendanaan lain di luar APBD dalam penyelenggaraan jalan (DAK, dana Inpres, dana APBN).

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Kemantapan Jalan pada Tahun 2025 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/target, yaitu Program Penyelenggaraan Jalan dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mendukung realisasi kinerja tersebut adalah Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Untuk lebih jelasnya penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 7 Realiasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Rasio Kemantapan Jalan Provinsi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		
		Nilai (Rp.)	%	% Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	241,464,868,800	226,262,725,564	93.7	93.7
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	241,464,868,800	226,262,725,564	93.7	93.7
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	152,310,605	151,177,275	99.26	99.26
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi [UPTD - UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi]	803,707,687	779,921,713	97.04	97.04
Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	270,600,000	269,848,425	99.72	99.72
Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	268,536,000	267,904,550	99.76	99.76
Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	39,189,078	38,682,000	98.71	98.71
Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	180,800,000	180,661,213	99.92	99.92
Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	331,102,699	331,004,000	99.97	99.97
Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	200,541,661	200,355,066	99.91	99.91
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	151,917,236	151,776,788	99.91	99.91
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	154,642,580	154,616,201	99.98	99.98
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	116,225,367	115,962,149	99.77	99.77
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	155,842,600	155,816,194	99.98	99.98
Rehabilitasi Jalan	31,897,175,064	31,858,554,765	99.88	99.88
Rekonstruksi Jalan	53,145,231,155	45,968,761,123	86.5	86.5
Pembangunan Jembatan	29,082,141,721	27,768,355,079	95.48	95.48
Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD - UPTD Workshop dan Peralatan]	577,816,250	575,856,261	99.66	99.66
Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	5,799,791,810	5,774,558,664	99.56	99.56
Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	5,272,066,551	5,270,805,541	99.98	99.98
Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	4,032,600,298	4,027,339,412	99.87	99.87

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		
		Nilai (Rp.)	%	% Capaian
Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	4,181,740,905	4,172,596,047	99.78	99.78
Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	3,036,385,008	3,035,344,530	99.97	99.97
Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	4,578,653,000	4,577,770,553	99.98	99.98
Pemeliharaan Berkala Jalan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	320,000,000	318,097,346	99.41	99.41
Pemeliharaan Berkala Jalan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	1,411,772,200	1,406,875,170	99.65	99.65
Pemeliharaan Berkala Jalan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	100,000,000	99,166,320	99.17	99.17
Pemeliharaan Berkala Jalan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	120,000,000	119,607,000	99.67	99.67
Pemeliharaan Berkala Jalan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	187,146,000	187,146,000	100	100
Pelebaran Jalan Menuju Standar	9,437,026,400	9,372,347,947	99.31	99.31
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5,736,756,263	5,594,398,346	97.52	97.52
Pembangunan Jalan	78,294,171,550	71,910,954,574	91.85	91.85
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	749,000,000	746,942,000	99.73	99.73
Pengelolaan Leger Jalan	679,979,112	679,523,312	99.93	99.93

Tabel tersebut menggambarkan realisasi anggaran untuk program/kegiatan yang mendukung pencapaian rasio kemantapan jalan provinsi. Program utama yang tercantum adalah "Penyelenggaraan Jalan", dengan total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 241.464.868.800,00. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp 226.262.725.564,00, dimana tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,70%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dana yang dialokasikan untuk program ini sepenuhnya digunakan untuk kegiatan yang relevan dalam mendukung kemantapan jalan di tingkat provinsi. Rasio penyerapan anggaran yang cukup tinggi menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dimana dapat dilihat dari capaian Sasaran Meningkatnya Kemantapan Jalan tahun 2025 mencapai 100,14% dan

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 66,09% yang dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi Kinerja} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\% \\ &= \frac{(241.464.868.800 \times 100,14\%) - 226.262.725.564}{241.464.868.800} \times 100\% \\ &= 0.06 \end{aligned}$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui besaran Tingkat efisiensi, Nilai efisiensi kinerja di konversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= \left(50\% + \frac{\text{efisiensi kinerja}}{20} \right) \times 50 \\ &= \left(50\% + \left(\frac{0.06}{20} \right) \right) \times 50 \\ &= 66.09\% \end{aligned}$$

B. Sasaran Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak

Sasaran selanjutnya yang ada pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak dengan indikator kinerja yang perlu dicapai yaitu Akses Air Minum Layak. Indikator akses air minum layak digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan keterjangkauan layanan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan bagi masyarakat. Pencapaian indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan layanan air minum yang aman dan berkelanjutan..

Cakupan air minum layak merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access Nasional*. Untuk penetapan target indikator kinerja Akses Air Minum layak demi mewujudkan sasaran meningkatnya cakupan air minum layak pada tahun 2025, Dinas BMCKTR menetapkan target Berdasarkan

Nilai Realisasi pada tahun sebelumnya dan berdasarkan Rencana Strategis(Renstra) Dinas Bina Marg Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Capaian indikator kinerja Akses Air Minum Layak di tahun 2025 di sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Akses Air Minum Layak tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	88%	88,56%	100,64%

Pencapaian sasaran Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak diperoleh oleh Bidang Cipta Karya melalui “Rekapitulasi Analisa Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum dan Daerah Rawan Air Per kab/kota di Sumatera Barat sampai tahun 2025” yang bersumber dari data PDAM Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat dan Pamsimas. Berdasarkan tabel 3.9 mengenai Capaian Kinerja Akses Air Minum Layak tahun 2025, target cakupan air minum layak sebesar 88% telah terlampaui dengan realisasi mencapai 88,56%, sehingga tingkat pencapaiannya adalah 100,64% dengan klasifikasi penilaian dapat dikategorikan “**Sangat Tinggi**”. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan akses air minum layak di atas target yang telah ditetapkan.

Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum dan Daerah Rawan Air Per kab/kota di Sumatera Barat pada tahun 2025, Analisanya dapat dihitung secara matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Akses Air Minum Layak} &= \frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses penyediaan air minum aman pada 19 kab/kota}}{\text{Jumlah rumah keseluruhan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.149.198}{1.318.448} \times 100\% \\
 \text{Akses Air Minum Layak} &= 87,16 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 3. 9 Akses Air Minum Layak di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah	TIDAK AKSES	AKSES LAYAK						TIDAK AKSES	AKSES LAYAK (%)				
				Jaringan Perpipaan			Bukan Jaringan Jaringan Perpipaan	Jaringan Perpipaan + Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah		Jaringan Perpipaan			Bukan Jaringan Jaringan Perpipaan	Jumlah
				PDAM/BLUD/UPTD	PAMSIMAS	JUMLAH					PDAM/BLUD/UPTD	PAMSIMAS	JUMLAH		
				(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)		(Rumah)	(Rumah)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9 (7+8)	10	11	12	13	14 (12+13)	15	16 (14+15)
I	Sumatera barat	1,327,196	151,815	402,435	259,301	661,736	513,645	1,175,381	1,651,474	11.44	30.32	19.54	49.86	38.70	88.56
1	Kab. Agam	116,766	11,805	15,135	25,717	40,852	64,109	104,961	169,070	10.11	10.11	22.02	34.99	54.90	89.89
2	Kab. Dharmasraya	58,526	4,032	1,390	14,658	16,048	38,446	54,494	92,940	6.89	6.89	25.05	27.42	65.69	93.11
3	Kab. Kepulauan Mentawai	13,934	3,944	2,150	5,328	7,478	2,512	9,990	12,502	28.30	28.30	38.24	53.67	18.03	71.70
4	Kab. Lima Puluh Kota	98,056	16,385	14,551	24,862	39,413	42,258	81,671	123,929	16.71	16.71	25.35	40.19	43.10	83.29
5	Kab. Padang Pariaman	92,129	20,426	26,838	14,507	41,345	30,358	71,703	102,061	22.17	22.17	15.75	44.88	32.95	77.83
6	Kab. Pasaman	75,767	10,372	20,828	27,155	47,983	17,412	65,395	82,807	13.69	13.69	35.84	63.33	22.98	86.31
7	Kab. Pasaman Barat	99,329	16,826	12,914	17,177	30,091	52,412	82,503	134,915	16.94	16.94	17.29	30.29	52.77	83.06
8	Kab. Pesisir Selatan	107,610	10,660	25,916	35,138	61,054	35,896	96,950	132,846	9.91	9.91	32.65	56.74	33.36	90.09

LKJIP 2025

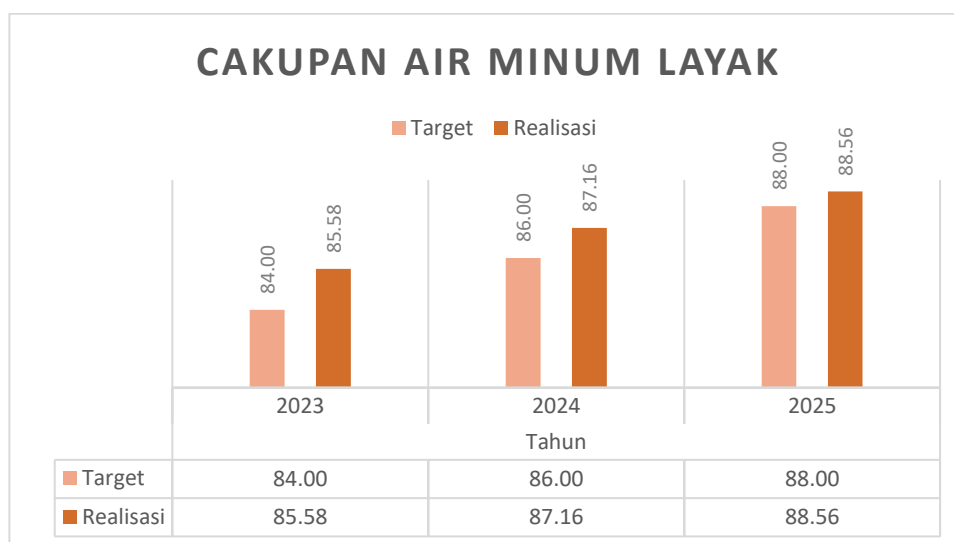
No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah	TIDAK AKSES	AKSES LAYAK						TIDAK AKSES	AKSES LAYAK (%)				
				Jaringan Perpipaan			Bukan Jaringan Jaringan Perpipaan	Jaringan Perpipaan + Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah		Jaringan Perpipaan			Bukan Jaringan Jaringan Perpipaan	Jumlah
				PDAM/BLUD/UPTD	PAMSIMAS	JUMLAH					SUMUR GALI, DLL	PDAM/BLUD/UPTD	PAMSIMAS		
				(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)		(Rumah)	(Rumah)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9 (7+8)	10	11	12	13	14 (12+13)	15	16 (14+15)
9	Kab. Sijunjung	56,304	15,686	16,237	20,012	36,249	4,369	40,618	44,987	27.86	27.86	35.54	64.38	7.76	72.14
10	Kabupaten Solok	118,899	21,124	16,276	19,348	35,624	62,151	97,775	159,926	17.77	17.77	16.27	29.96	52.27	82.23
11	Kab. Solok Selatan	38,140	7,270	11,976	16,959	28,935	1,935	30,870	32,805	19.06	19.06	44.47	75.87	5.07	80.94
12	Kab. Tanah Datar	79,187	5,481	22,585	18,665	41,250	32,456	73,706	73,706	6.92	6.92	23.57	52.09	40.99	93.08
13	Kota Bukittinggi	27,744	254	10,395	0	10,395	17,095	27,490	44,585	0.92	0.92	0.00	37.47	61.62	99.08
14	Kota Padang	238,362	4,796	130,572	14,471	145,043	88,523	233,566	322,089	2.01	2.01	6.07	60.85	37.14	97.99
15	Kota Padang Panjang	17,425	0	10,724	0	10,724	6,701	17,425	24,126	0.00	0.00	0.00	61.54	38.46	100.00
16	Kota Pariaman	17,748	734	4,171	2,378	6,549	10,465	17,014	27,479	4.14	4.14	13.40	36.90	58.96	95.86
17	Kota Payakumbuh	35,896	176	33,391	754	34,145	1,575	35,720	35,720	0.49	0.49	2.10	95.12	4.39	99.51
18	Kota Sawahlunto	16,253	1,470	9,090	2,172	11,262	3,521	14,783	14,783	9.04	9.04	13.36	69.29	21.66	90.96
19	Kota Solok	19,121	374	17,296	0	17,296	1,451	18,747	20,198	1.96	1.96	0.00	90.46	7.59	98.04

Sumber : e-SPM Kemendagri - SICALMERS - OPD Pengampu SPM Air Minum dan Air Limbah Domestik 19 Kabupaten/Kota per Desember 2025

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Akses Air Minum Layak terhadap tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Akses Air Minum Layak dengan tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Akses Air Minum Layak	84	86	88	85,58	87,16	88,56	101,88	101,35	100,14



Gambar 3. 3 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Akses Air Minum Layak dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.11 menunjukkan perbandingan realisasi kinerja akses air minum layak terhadap target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 hingga 2025. Cakupan air minum layak pada tahun 2023–2025 menunjukkan kinerja sangat baik, ditandai dengan realisasi yang secara konsisten melampaui target setiap tahun. Capaian meningkat dari 85,58% pada 2023 menjadi 88,56% pada 2025, seiring dengan peningkatan target yang ditetapkan. Kondisi ini menegaskan bahwa pelaksanaan program penyediaan air minum layak berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan akses layanan kepada masyarakat secara nyata. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap target akhir periode Renstra dan disajikan pada table berikut:

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Akses Air Minum Layak s/d tahun 2025 Terhadap Target Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET S/D 2025	REALISASI S/D 2025	TARGET S/D 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	88	88.56	90

Berdasarkan Tabel 3.12, sasaran meningkatnya cakupan air minum layak dengan indikator kinerja akses air minum layak menunjukkan kinerja yang melampaui target Renstra hingga tahun 2025. Target capaian sebesar 88% berhasil direalisasikan sebesar 88,56%, sehingga target kinerja telah tercapai dan terlampaui. Untuk tahun 2026, target ditetapkan meningkat menjadi 90%, yang mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam perluasan akses layanan air minum layak kepada masyarakat.

Jika dibandingkan dengan Capaian Akses Air Minum Layak Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data awal dari BPS diketahui bahwa Persentase Capaiannya Adalah sebesar 86,82 sedangkan capaian provinsi Sumatera Barat mencapai 88,56.

Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Akses Air Minum Layak Provinsi sumbar dengan Provinsi Sumsel

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian (2025)	
		SUMBAR (%)	SUMSEL (%)
1.	Akses Air Minum Layak	88,56	86,82

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Perkembangan “Cakupan Air Minum Layak” dalam 5(lima) tahun terakhir juga dapat dilihat pada Grafik berikut.



Gambar 3. 4 Grafik Cakupan Air Minum Layak Tahun 2021-2025

Capaian cakupan air minum layak periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021 realisasi sebesar 82,26% dan meningkat setiap tahun hingga mencapai 88,56% pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan penyediaan air minum layak Kab/Kota di provinsi Sumatera barat, sekaligus menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar kepada masyarakat

Ada beberapa faktor pendukung yang membantu dalam pencapaian target kinerja Akses Air Minum Layak ialah sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan kab/kota dalam penjaminan kualitas data SPM.
2. Melakukan monev terkait kegiatan SPM dan Pamsimas
3. Pembinaan kab/kota terkait kegiatan SPM dan optimas melalui bimtek dan Workshop.
4. Advokasi kab kota untuk peningkatan capaian SPM dan kegiatan Pamsimas.
5. Mendorong kab/kota untuk menyusun program dan perencanaan (Readiness Criteria) melalui pembinaan dan monev.
6. Berkoordinasi dengan balai BPPW untuk peningkatan Akses air minum ke kab/kota.

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja Akses Air Minum Layak tentunya juga ada beberapa kendala yang dapat menjadi faktor penghambat, antara lain:

1. Untuk mencapai outcome butuh konsistensi dan waktu pelaksanaan yang lama (5-10 th).
2. Kewenangan provinsi hanya ada pada kegiatan SPAM Regional sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah.
3. Biaya pelaksanaan dan waktu yang dibutuhkan sangat besar dan lama (long term construction).
4. Konflik sosial yang sangat tinggi antar kab/kota.
5. Kemampuan fiskal provinsi dan kab/kota di Sumatera Barat sangat lemah.
6. Rendahnya kepedulian eksekutif dan legislatif terhadap akses air minum layak

Upaya yang dapat dilakukan untuk semakin meningkatkan Cakupan Air Minum Layak dimasa yang akan datang antara lain:

1. Memilih kab/kota yang memiliki minat tinggi terhadap SPAM dan punya komitmen.
2. Advokasi kepada kepala daerah.
3. Mengoptimalkan akses air minum yang lebih cepat dapat direalisasikan melalui PAMSIMAS.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 1 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar Rp 987.856.500,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		
		Nilai (Rp.)	%	% Capaian
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	679,938,248	606,070,018	89.14	89.14
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	679,938,248	606,070,018	89.14	89.14
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	76,330,475	74,763,990	97.95	97.95
Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	209,336,273	166,518,819	79.55	79.55
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	90,269,200	86,014,095	95.29	95.29
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	304,002,300	278,773,114	91.7	91.7

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 679,938,248,- terealisasi sebesar Rp 606,070,018,- atau 89.14%. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya cakupan air minum layak (100,64%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (89,14%) dengan tingkat efisiensi mencapai 78,76% yang dihitung menggunakan rumus perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\% \\ &= \frac{(679.938.248 \times 100.64\%) - 606.070.018}{679.938.248} \times 100\% \\ &= 0.12 \end{aligned}$$

Keterangan:

- PA = Pagu Anggaran
 CK = Capaian Kinerja (%)
 RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, Tingkat efisiensi kinerja di konversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = \left(50\% + \frac{\text{efisiensi kinerja}}{20} \right) \times 50$$

$$= (50\% + (\frac{0,12}{20}) \times 50$$

$$= 78,76\%$$

C. Sasaran Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak

Sasaran selanjutnya yang perlu dipenuhi oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ialah Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak dengan indikator kinerja yang perlu dicapai yaitu Akses Sanitasi Layak. Indikator akses sanitasi layak digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang telah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, menurunkan risiko pencemaran lingkungan, serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat..

Sama halnya dengan air minum, cakupan sanitasi merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target Universal Access Nasional. Berdasarkan data yang ada pada Bidang Cipta Karya, diketahui bahwa untuk mencapai target pemenuhan rumah tangga bersanitasi dianalisis dari data akses jamban yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Untuk Penetapan target Cakupan Sanitasi Layak di tahun 2025 Dinas BMCKTR berpedoman pada capaian tahun sebelumnya dan Capaian Sasaran tersebut pada tahun 2025 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 14 Capaian Akses Sanitasi Layak Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Layak	88%	86,79%	98,62%

Berdasarkan Tabel, capaian akses sanitasi layak pada tahun 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Target kinerja untuk cakupan sanitasi layak adalah 88%, sementara realisasi yang dicapai sebesar 88,11%, yang berarti tingkat pencapaiannya adalah 100,13% dengan klasifikasi penilaian dapat dikategorikan **“Sangat Tinggi”**. Hasil ini menunjukkan keberhasilan strategi

Pemerintah Provinsi yang diterapkan untuk meningkatkan cakupan sanitasi layak, mencerminkan upaya yang efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas sanitasi yang layak. Hal ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi yang kuat terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui akses sanitasi yang lebih baik.

Berdasarkan analisa dari data Laporan Kemajuan Akses Air Limbah Domestik Provinsi Sumatera Barat di Tahun 2025, dapat dihitung Akses Sanitasi Layak pada Tahun 2025 secara matematis dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Akses Sanitasi Layak} &= \frac{\text{jumlah rumah yang akses sanitasi pada 19 Kab/Kota sampai tahun 2024}}{\text{Jumlah rumah keseluruhan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.151.846}{1.327.196} \times 100\% \\
 \text{Akses Sanitasi Layak} &= 86,70
 \end{aligned}$$

LKJIP 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah	TIDAK AKSES		AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN		JUMLAH				PERSENTASE (%)			
			BABS	CUBLUK PERKOTAAN	CUBLUK PERDESAAN	SPALDS	SPALDS AMAN	SPALD-T AMAN	TIDAK AKSES	AKSES (DASAR + LAYAK)	AKSES AMAN	AKSES (DASAR + LAYAK + AMAN)	TIDAK AKSES	AKSES (DASAR + LAYAK)	AKSES AMAN	TOTAL AKSES
			(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4+5)	11 (6+7)	12 (8+9)	13 (6+12)	14	15	16	17 (15+16)
Provinsi Sumatera Barat		1,327,196	0	175,350	312,543	728,761	89,247	21,295	175,350	1,041,304	110,542	1,151,846	13.21	78.46	8.33	86.79
1	Kab. Agam	116,766	0	21,156	20,895	67,108	4,986	2,621	21,156	88,003	7,607	95,610	18.12	75.37	6.51	81.88
2	Kab. Dharmasraya	58,526	0	1,456	1,209	52,186	2,780	895	1,456	53,395	3,675	57,070	2.49	91.23	6.28	97.51
3	Kab. Kepulauan Mentawai	13,934	0	2,876	1,621	9,018	0	419	2,876	10,639	419	11,058	20.64	76.35	3.01	79.36
4	Kab. Lima Puluh Kota	98,056	0	15,396	20,312	53,143	7,126	2,079	15,396	73,455	9,205	82,660	15.70	74.91	9.39	84.30
5	Kab. Padang Pariaman	92,129	0	11,125	47,326	29,537	2,045	2,096	11,125	76,863	4,141	81,004	12.08	83.43	4.49	87.92
6	Kab. Pasaman	75,767	0	14,493	28,869	32,092	0	313	14,493	60,961	313	61,274	19.13	80.46	0.41	80.87
7	Kab. Pasaman Barat	99,329	0	11,194	11,489	76,586	0	60	11,194	88,075	60	88,135	11.27	88.67	0.06	88.73
8	Kab. Pesisir Selatan	107,610	0	8,750	38,259	53,174	4,489	2,938	8,750	91,433	7,427	98,860	8.13	84.97	6.90	91.87
9	Kab. Sijunjung	56,304	0	21,519	22,159	11,236	307	1,083	21,519	33,395	1,390	34,785	38.22	59.31	2.47	61.78
10	Kabupaten Solok	118,899	0	17,274	61,896	36,121	2,918	690	17,274	98,017	3,608	101,625	14.53	82.44	3.03	85.47

LKJIP 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah	TIDAK AKSES		AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN		JUMLAH				PERSENTASE (%)			
			BABS	CUBLUK PERKOTAAN	CUBLUK PERDESAAN	SPALDS	SPALDS AMAN	SPALD-T AMAN	TIDAK AKSES	AKSES (DASAR + LAYAK)	AKSES AMAN	AKSES (DASAR + LAYAK + AMAN)	TIDAK AKSES	AKSES (DASAR + LAYAK)	AKSES AMAN	TOTAL AKSES
			(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(Rumah)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4+5)	11 (6+7)	12 (8+9)	13 (6+12)	14	15	16	17 (15+16)
11	Kab. Solok Selatan	38,140	0	4,271	19,256	14,035	0	578	4,271	33,291	578	33,869	11.20	87.29	1.52	88.80
12	Kab. Tanah Datar	79,187	0	14,879	33,248	28,491	0	2,569	14,879	61,739	2,569	64,308	18.79	77.97	3.24	81.21
13	Kota Bukittinggi	27,744	0	3,024	0	22,288	2,432	0	3,024	22,288	2,432	24,720	10.90	80.33	8.77	89.10
14	Kota Padang	238,362	0	24,257	2,896	161,868	47,345	1,996	24,257	164,764	49,341	214,105	10.18	69.12	20.70	89.82
15	Kota Padang Panjang	17,425	0	326	0	14,710	966	1,423	326	14,710	2,389	17,099	1.87	84.42	13.71	98.13
16	Kota Pariaman	17,748	0	1,325	1,886	13,486	213	838	1,325	15,372	1,051	16,423	7.47	86.61	5.92	92.53
17	Kota Payakumbuh	35,896	0	98	501	25,421	9,876	0	98	25,922	9,876	35,798	0.27	72.21	27.51	99.73
18	Kota Sawahlunto	16,253	0	1,268	721	12,455	1,352	457	1,268	13,176	1,809	14,985	7.80	81.07	11.13	92.20
19	Kota Solok	19,121	0	663	0	15,806	2,412	240	663	15,806	2,652	18,458	3.47	82.66	13.87	96.53

Sumber : e-SPM Kemendagri - SICALMERS - OPD Pengampu SPM Air Minum dan Air Limbah Domestik 19 Kabupaten/Kota per Desember 2025

Untuk Perbandingan Realisasi kinerja dan capaian Akses Sanitasi Layak tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 15 Realisasi Kinerja & Capaian Akses Sanitasi Layak tahun 2023 s/d 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2022	2023	2025
1.	Akses Sanitasi Layak	84	86	88	84,95	86,70	86,79	101,32	101,13	98.62



Gambar 3. 5 Grafik Capaian Kinerja Akses Sanitasi Layak

Capaian indikator Akses Sanitasi Layak selama periode 2023–2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun belum sepenuhnya konsisten terhadap target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 dan 2024, realisasi capaian mampu melampaui target, yang mengindikasikan efektivitas pelaksanaan program sanitasi. Namun, pada tahun 2025 realisasi sebesar 86,79% belum mencapai target 88,00%, sehingga menunjukkan adanya kendala dalam akselerasi pencapaian. Tidak tercapainya target pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Belum adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi yang diprakarsai secara optimal, sehingga menghambat sinergi, koordinasi, dan dukungan lintas kewenangan dalam penyelenggaraan layanan sanitasi.

2. Masih terdapat kabupaten/kota yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), yaitu:
- Kabupaten Sijunjung
 - Kabupaten Lima Puluh Kota
 - Kabupaten Pasaman
 - Kabupaten Padang Pariaman
 - Kabupaten Kepulauan Mentawai
 - Kabupaten Solok
 - Kota Sawahlunto

Ketiadaan IPLT di daerah tersebut berdampak pada belum optimalnya sistem pengelolaan lumpur tinja terjadwal (LLTT), sehingga akses sanitasi layak belum dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Secara evaluatif, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan akses sanitasi tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, regulasi, dan kerja sama antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa percepatan fasilitasi MoU, pembangunan dan optimalisasi IPLT, serta penguatan sistem layanan sanitasi berbasis wilayah.

Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 yang telah dihitung sebelumnya dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Akses Sanitasi Layak s/d Tahun 2025 Terhadap Rentsra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET S/D 2025	REALISASI S/D 2025	TARGET S/D 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Layak	88	86,79	90

Apabila dibandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra), capaian indikator Akses Sanitasi Layak hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi kinerja belum sepenuhnya berada pada jalur yang diharapkan (on track) untuk mencapai target akhir

periode Renstra. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya capaian sempat melampaui target tahunan, ketidakmampuan memenuhi target pada tahun 2025 menjadi indikasi adanya potensi deviasi terhadap target jangka menengah.

Target Renstra yang bersifat progresif menuntut adanya peningkatan capaian yang lebih signifikan setiap tahunnya. Namun demikian, realisasi tahun 2025 menunjukkan bahwa laju peningkatan akses sanitasi cenderung melambat, sehingga berisiko menghambat pencapaian target kumulatif pada akhir periode Renstra..

Jika dibandingkan dengan Akses Sanitasi Layak Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data awal dari Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa Persentase Capaian Akses Sanitasi Layak pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar 85,50% sedangkan capaian Provinsi Sumatera Barat telah berada di angka 88,11%.

Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Persentase Akses Sanitasi Dengan Provinsi Sumatera Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (2025)	
		SUMBAR(%)	SUMSEL (%)
1.	Akses Sanitasi Layak	88,11	85,50

Perkembangan “Akses Sanitasi Layak” dalam 5(lima) tahun terakhir juga dapat dilihat pada Grafik berikut.



Gambar 3. 6 Perkembangan Akses Sanitasi Layak Tahun 2021 - 2025

Capaian indikator Akses Sanitasi Layak menunjukkan tren pertumbuhan positif yang berkelanjutan selama periode 2021–2025. Realisasi kinerja pada tahun 2025 tercatat sebesar 88,11%, yang berarti telah berhasil melampaui target Renstra yang ditetapkan sebesar 88%. Jika dilihat secara historis, terjadi peningkatan bertahap dari tahun 2021 (82,05%) hingga 2025, yang mencerminkan keberhasilan strategi dalam meningkatkan cakupan sanitasi bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan akses sanitasi layak pemerintah provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan hal – hal berikut:

1. Melakukan pendampingan ke kab/kota yang melakukan pemutakhiran dokumen SSK.
2. Melakukan monev terkait kegiatan sanitasi yang dilakukan kab/kota.
3. Pembinaan kab/kota terkait kegiatan sanitasi melalui bimtek atau workshop.
4. Advokasi kab/kota agar melakukan pemutakhiran dokumen SSK untuk kab/kota yang masa berlaku dokumen SSK telah berakhir.

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja Akses Sanitasi Layak tentunya juga ada beberapa kendala yang dapat menjadi faktor penghambat, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan banyak berada di kab./kota, Di tingkat provinsi lebih kepada pembinaan.
2. Sumber pembiayaan dari APBN lebih kepada operasional, rehab, optimalisasi IPLT eksisting.
3. Keterbatasan anggaran di kab/kota.
4. Kecilnya rasio anggaran di kab/kota untuk program sanitasi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk semakin meningkatkan Cakupan Sanitasi Layak di masa yang akan datang ialah dengan melakukan advokasi kepada tim anggaran legislatif tentang program strategi sanitasi.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 Program dengan 2 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dengan total sebesar Rp 2.389.803.925,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatkan Cakupan Sanitasi Layak. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		
		Nilai (Rp.)	%	% Capaian
Uraian				
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1,712,654,800	1,659,745,323	96.91	96.91
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1,712,654,800	1,659,745,323	96.91	96.91
Pembangunan TPA/TPST/SPA	1,136,895,850	1,136,895,850	100	100
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	575,758,950	522,849,473	90.81	90.81
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	677,149,125	601,838,386	88.88	88.88
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	677,149,125	601,838,386	88.88	88.88
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	243,620,275	215,783,000	88.57	88.57

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		
		Uraian	Nilai (Rp.)	%
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	433,528,850	386,055,386	89.05	89.05

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 2.389.803.925,- terealisasi sebesar Rp 2.261.583.709,-. dengan Tingkat efisiensi penggunaan anggaran 63,74% yang dihitung menggunakan rumus perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\% \\ &= \frac{(2.389.803.925 \times 100.13\%) - 2.261.583.709}{2.389.803.925} \times 100\% \\ &= 0.05 \end{aligned}$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui besaran tingkat efisiensi, nilai efisiensi kinerja di konversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= \left(50\% + \frac{\text{efisiensi kinerja}}{20} \right) \times 50 \\ &= \left(50\% + \left(\frac{0.05}{20} \right) \right) \times 50 \\ &= 63,74\% \end{aligned}$$

D. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis

➤ Indikator Presentase Bangunan Strategis Terbangun

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan bangunan strategis sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bangunan strategis mencakup fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan

kepada masyarakat. Persentase bangunan strategis terbangun mencerminkan kemajuan fisik pembangunan serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah direncanakan.

Pada 29 September 2023, Bappeda dan Biro Organisasi mengadakan rapat di Ruang Rapat Kepala Bidang P2EPD untuk membahas target IKU pada RPJM 2021–2026 yang diperkirakan tidak akan tercapai. Salah satu target yang dibahas adalah terkait **Persentase Bangunan Strategis Terbangun** yang menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Target ini mengalami revisi karena dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan realisasi dan ketersediaan anggaran.

Awalnya, target **Persentase Bangunan Strategis Terbangun** ditetapkan sebesar 83,33% pada Rencana Strategis (Renstra 2021-2026). Namun, perhitungan target ini didasarkan pada asumsi bahwa seluruh bangunan strategis akan selesai 100%, sedangkan pada kenyataannya, pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, target untuk tahun 2026 direvisi menjadi **11,11%**, dengan dasar pertimbangan:

1. RPJMD 2021–2026.
2. Realisasi tahun 2022.
3. Perbaikan metode perhitungan target
4. Ketersediaan anggaran.

Total bangunan strategis yang harus diselesaikan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam periode 2021–2026 adalah sebanyak **18 unit**, meliputi:

1. Gedung Budaya
2. Perkimtan
3. Limbah B3
4. Gedung MUI
5. Inspektorat
6. Gedung PPIPTEK
7. Shelter Sasak
8. Shelter SLBN 2 Padang
9. Shelter Sikabalu
10. Shelter SDN 12 Ulakan Tapakis

11. Shelter MTs Darul Hikmah
12. Shelter Maligi
13. Shelter Tanjung Mutiara
14. TTIC Pasaman Barat
15. Main Stadium
16. Amphitheater Puncak Paku
17. Amphitheater Pagaruyung
18. Shelter Linggar Jati

Hingga tahun 2025, dua bangunan telah selesai, yaitu:

1. Shelter Linggar Jati (2021)
2. Shelter Maligi (2024)
3. Gedung MUI (2025)

Persentase Bangunan Strategis Terbangun dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3. 19 Capaian Indikator Persentase Bangunan Strategis Terbangun di Sumatera Barat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	11,11%	16,67%	150,04%

Pada tahun 2025, indikator kinerja **Persentase Bangunan Strategis Terbangun di Sumatera Barat** menunjukkan pencapaian yang signifikan, meskipun sebelumnya target indikator ini mengalami penyesuaian. Revisi ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk ketersediaan anggaran, perbaikan metode perhitungan target, dan realisasi pembangunan sebelumnya.

Realisasi tahun 2025 menunjukkan hasil sebesar **11,11%**, yang berarti melampaui target baru yang telah ditetapkan. Dengan capaian sebesar **150,04%** dari target yang direncanakan maka klasifikasi penilaian untuk Persentase Bangunan Strategis Terbangun dapat diindikasikan sebagai **“Sangat Tinggi”**, hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan meskipun dilakukan secara bertahap. Revisi target



Gambar 3. 7 Grafik Perbandingan Capaian Indikator Persentase Bangunan Strategis Terbangun tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya

Realisasi indikator Persentase Bangunan Gedung Strategis Terbangun menunjukkan performa yang sangat progresif dan konsisten melampaui target yang ditetapkan meskipun telah dilakukan penyesuaian target. Pada tahun 2023, realisasi tercapai tepat sesuai target sebesar 6,00. Memasuki tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan di mana realisasi mencapai 11,11, jauh melampaui target yang tetap dipatok pada angka 6,00. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 16,67, melampaui target penyesuaian sebesar 11,11.

Penyesuaian target ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk realisasi anggaran, perbaikan metode perhitungan dalam RPJMD, serta pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara bertahap.

Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 yang telah dihitung sebelumnya dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Bangunan Strategis Terbangun s/d 2025 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET s/d 2025	REALISASI s/d 2025	TARGET s/d 2026
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	83,33 %	16,67%	100%

Berdasarkan Tabel 3.22, kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung strategis yang diukur melalui indikator persentase bangunan strategis terbangun menunjukkan capaian realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 16,67%. Capaian ini masih berada jauh di bawah target Renstra sampai dengan 2025 sebesar 83,33%, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan kinerja yang cukup signifikan. Sementara itu, target untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar **100%**, sesuai dengan rencana strategis (Renstra) yang mencerminkan tujuan akhir dari penyelesaian seluruh pembangunan gedung strategis dalam periode RPJMD 2021–2026. Capaian hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun target awal telah disesuaikan, realisasi yang dicapai mampu melampaui ekspektasi. Hal ini memberikan indikasi positif terhadap kelanjutan pembangunan guna memenuhi target strategis pada tahun 2026.

Realisasi indikator Persentase Bangunan Strategis Terbangun tidak dapat dibandingkan dengan rata - rata realisasi nasional, karena yang menggunakan indikator ini baru Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk perkembangan indikator dalam waktu 5(lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. 8 Perkembangan Indikator Persentase Bangunan Strategis Terbangun

Berdasarkan data pada grafik, realisasi persentase bangunan gedung strategis terbangun menunjukkan tren peningkatan namun masih relatif rendah. Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi stagnan di angka 6,00%, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 11,11%, dan kembali naik pada tahun 2025 mencapai 16,67%. Meskipun terdapat perkembangan positif dari tahun ke tahun, capaian tersebut mengindikasikan bahwa percepatan pembangunan masih diperlukan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Ada beberapa Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dan sasaran, antara lain:

1. Menyiapkan dokumen perencanaan Bangunan Gedung (DED, Dokling, dan FS)
2. Ketersediaan lahan untuk pembangunan bangunan strategis tersebut

Meski demikian juga terdapat hambatan – hambatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Presentase Bangunan Strategis terbangun dihitung berdasarkan jumlah bangunan strategis terbangun, bangunan strategis Provinsi Sumatera Barat berjumlah 18 untuk menyelesaikan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar.

2. Presentase Bangunan Strategis terbangun dihitung berdasarkan kondisi bangunan 100 % terbangun, sedangkan penganggaran yang dilakukan/disetujui tidak dalam kondisi 100 % dibangun (dibangun bertahap)
3. Kegiatan/ Pekerjaan yang dianggarkan di DPA kurang sesuai dengan rencana penganggaran Penyelesaian
4. Kurangnya Kemampuan Fiskal Provinsi.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk Peningkatan Kinerja Persentase Bangunan Strategis Terbangun ialah sebagai berikut:

1. Mengupayakan Penganggaran bangun Gedung dilakukan dalam 1 kali penganggaran bukan dengan cara bertahap;
2. Menyesuaikan alokasi pendanaan dengan rencana penyelesaian Bangunan Gedung;
3. Untuk menutup timpangnya usulan dengan alokasi dana Pemprov Sumbar perlu untuk mengoptimalkan pengusulan pola pendanaan-pendanaan lainnya.

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Dalam mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis didukung oleh Program Penataan Bangunan Gedung, dengan kegiatan pendukungnya yaitu Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. Untuk lebih jelasnya penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 22 Realisasi Anggaran Pendukung Indikator Presentase Bangunan Strategis Terbangun

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		
		Nilai (Rp.)	%	% Capaian
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	39,164,362,561	37,964,174,734	96.94	96.94
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	39,164,362,561	37,964,174,734	96.94	96.94
Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	92,597,850	77,913,565	84.14	84.14

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		
		Nilai (Rp.)	%	% Capaian
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	65,632,650	40,684,560	61.99	61.99
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7,327,661,600	6,607,953,500	90.18	90.18
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	31,605,710,046	31,165,250,648	98.61	98.61
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi [UPTD - UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung]	72,760,415	72,372,461	99.47	99.47

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 39.164.362.561,- terealisasi sebesar Rp 37.964.174.734,- atau 96,94%. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Presentase Bangunan Strategis Terbangun (150,04%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,94%) dengan tingkat efisiensi 182,76% yang dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi Kinerja} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\% \\
 &= \frac{(39.164.362.561 \times 150.07\%) - 37.964.174.734}{39.164.362.561} \times 100\% \\
 &= 0.53
 \end{aligned}$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, Tingkat efisiensi kinerja di konversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Efisiensi} &= \left(50\% + \frac{\text{efisiensi kinerja}}{20} \right) \times 50 \\
 &= \left(50\% + \left(\frac{0.53}{20} \right) \right) \times 50 \\
 &= 182,76\%
 \end{aligned}$$

E. Sasaran Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 97 bahwa Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang. Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan bentuk dari pembangunan, maka bidang tata ruang merumuskan indikator kinerja utamanya berupa Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Target Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2021-2026 serta capaian dari tahun sebelumnya. Capaian Sasaran mewujudkan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 23 Capaian Kinerja Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi	89,70%	89,70%	100,00%

Persentase kesesuaian dihitung berdasarkan formula : perbandingan antara luas kawasan (Ha) yang sesuai pemanfaatan ruangnya dengan RTRW Provinsi dengan luas rencana pola ruang (Ha) RTRW Provinsi dikali 100. adapun data yang digunakan dalam menghitung persentase kesesuaian yaitu peta penggunaan lahan Prov. Sumbar Tahun 2025 dengan peta rencana pola ruang RTRW Prov. Sumbar Tahun 2012-2032. metode analisis yang digunakan untuk menghitung persentase kesesuaian yaitu metode overlay peta dengan aplikasi GIS. Secara rinci dapat dilihat dibawah ini

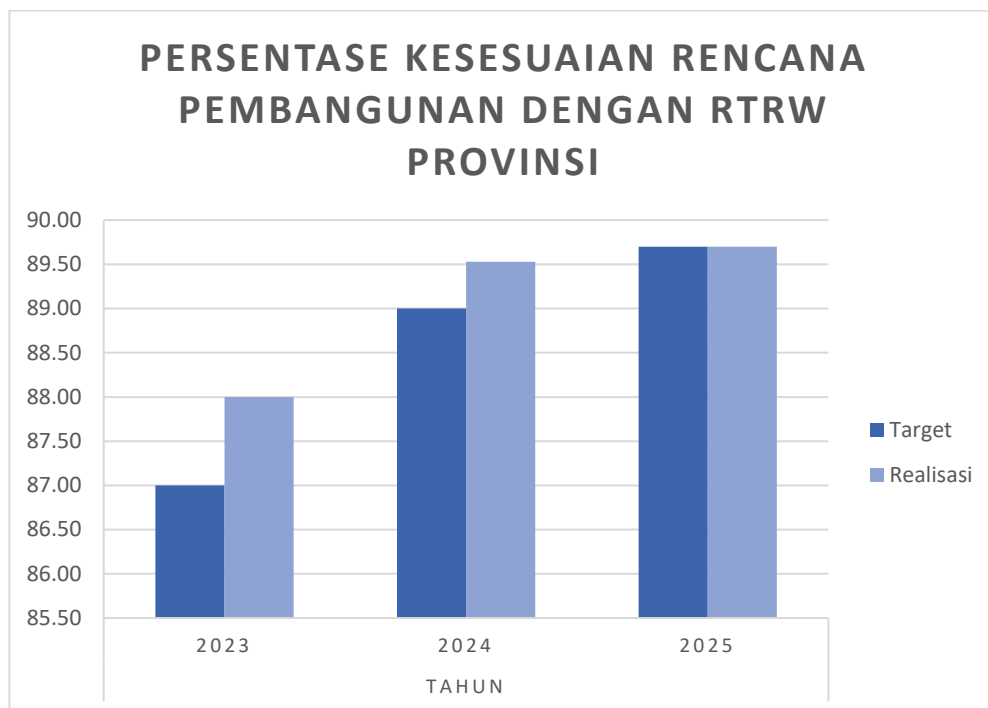
$$\begin{aligned}
 &\text{Presentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi} = \frac{\text{Luas kawasan yang sesuai pemanfaatannya}}{\text{Luas rencana pola ruang RTRW Provinsi}} \times 100\% \\
 &= \frac{3.745.962,60\text{Ha}}{4.176.101,00 \text{ Ha}} \times 100\% \\
 &= 89,70 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 3. 24 Kesesuaian Penggunaan Lahan Tahun 2024 Dengan Rencana Pola Ruang Rtrw

NO	KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2024 DENGAN RENCANA POLA RUANG RTRW	LUAS (HEKTAR)	PERSENTASE (%)
1	KAWASAN YANG SESUAI PEMANFAATAN RUANGNYA DENGAN RENCANA POLA RUANG RTRW	3.745.962,60	89,70
2	KAWASAN YANG TIDAK SESUAI PEMANFAATAN RUANGNYA DENGAN RENCANA POLA RUANG RTRW	430.138,40	10,30
	TOTAL LUAS RENCANA POLA RUANG RTRW	4.176.101	100

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Presentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Presentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi	87	89	89,70	88	89,53	89,70	101,14	100,59	100,00



Gambar 3. 9 Capaian Presentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi

Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi menunjukkan tren peningkatan selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, realisasi capaian sebesar 88%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 87%. Selanjutnya, pada tahun 2024, realisasi meningkat menjadi 89,5%, juga lebih tinggi dibandingkan target 89%. Pada tahun 2025, realisasi mencapai 89,7%, sejalan dengan target yang ditetapkan pada angka yang sama. Capaian ini mencerminkan konsistensi dan komitmen perangkat daerah dalam memastikan keselarasan antara program pembangunan dan kebijakan penataan ruang provinsi. Secara keseluruhan, kinerja indikator ini menunjukkan hasil yang baik dan berada pada kategori tercapai sangat baik, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan RTRW Provinsi.

Pada Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2021-2026 telah ditetapkan target yang perlu dicapai untuk Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi pada tahun 2025 ialah sebesar 89%. Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 yang telah dihitung sebelumnya dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2021 - 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2025	TARGET s/d 2025	TARGET s/d 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Presentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi	89,70	89%	90%

Realisasi indikator Presentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi hingga tahun 2025 mencapai 89,70%, melampaui target Renstra 2025 sebesar 89% dan mendekati target 2026 sebesar 90%. Hal ini menunjukkan kinerja sangat baik dan konsistensi dalam meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan dengan kebijakan tata ruang..

Realisasi indikator Presentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi tidak dapat dibandingkan dengan rata - rata realisasi nasional, karena yang menggunakan indikator ini baru Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk capaian indikator Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi dalam lima (5) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut



Gambar 3. 10 Capaian indikator Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi dalam lima (5) tahun

Sejak tahun 2021 hingga 2025, persentase kesesuaian terus meningkat. Ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan.

Untuk terus meningkatkan Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi pemerintah telah melakukan beberapa Upaya diantaranya:

1. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang.
2. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.

Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

Sejauh ini belum ada hambatan/ kendala yang signifikan. saat ini perhitungan persentase kegiatan hanya berdasarkan pada data peta penggunaan lahan karena berdasarkan Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pasal 58 bahwa kewenangan pemerintah provinsi dalam menerbitkan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang hanya pada kawasan yang merupakan lintas administratif kabupaten/kota sehingga data yang diperoleh belum optimal.

Selain itu pemerintah Provinsi juga akan melakukan beberapa Upaya dimasa yang akan datang seperti:

1. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah.
2. Perhitungan persentase kesesuaian dilakukan lebih detail dengan mengumpulkan data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjadi kewenangan provinsi serta data kesesuaian lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana pola ruang RTRW prov., kesesuaian waktu

pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan indikasi program utama RTRW provinsi

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 4 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp **873,389,261,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 26 Realisasi anggaran Pendukung Sasaran Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		
		Nilai (Rp.)	%	% Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	873,389,261	812,852,320	93.07	93.07
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	241,782,850	217,260,524	89.86	89.86
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	102,190,200	98,874,992	96.76	96.76
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	68,037,300	53,936,313	79.27	79.27
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	71,555,350	64,449,219	90.07	90.07
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	140,591,500	135,324,685	96.25	96.25
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	138,496,400	133,263,385	96.22	96.22
Peningkatan Kompetensi SDM di Bidang Penataan Ruang	2,095,100	2,061,300	98.39	98.39
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	218,178,711	207,289,660	95.01	95.01
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	99,435,250	96,816,619	97.37	97.37
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	118,743,461	110,473,041	93.04	93.04
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	272,836,200	252,977,451	92.72	92.72
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	37,813,900	33,257,561	87.95	87.95
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	57,935,300	55,575,594	95.93	95.93
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	143,873,200	135,400,485	94.11	94.11

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		
		Nilai (Rp.)	%	% Capaian
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	6,570,000	4,394,000	66.88	66.88
Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	26,643,800	24,349,811	91.39	91.39

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **873,389,261,-** terealisasi sebesar Rp **812,852,320,-** atau 93,07%. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang (100,00%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (93,07%) dengan nilai efisiensi mencapai 69,85% yang dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\% \\
 &= \frac{(873,389,261 \times 100,00\%) - 812,852,320}{873,389,261} \times 100\% \\
 &= 0.07
 \end{aligned}$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, Tingkat efisiensi kinerja di konversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Efisiensi} &= \left(50\% + \frac{\text{efisiensi kinerja}}{20} \right) \times 50 \\
 &= \left(50\% + \left(\frac{0.07}{20} \right) \right) \times 50 \\
 &= 67,33\%
 \end{aligned}$$

F. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Salah satu sasaran dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui tata kelola Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat yang baik, bersih dan profesional. Profesional diartikan menunjukkan mutu dan kualitas, yaitu seseorang yang memiliki 3

hal pokok dalam dirinya (Skill, Knowledge dan Attitude). Skill berarti seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya. Knowledge berarti tak hanya ahli di bidangnya, tapi juga menguasai, minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan bidangnya. Dan yang terakhir Attitude, yang mana bukan hanya pintar dan cerdas, tapi juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut yang perlu dipenuhi yaitu Indikator Meningkatnya Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, yang ditargetkan tercapai BB (72,00) di tahun 2025. Penetapan target indikator tersebut berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026. Realisasi Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 27 Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB 72,00%	B 70,52%	97,94%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi" memiliki indikator berupa Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Target yang ditetapkan untuk nilai tersebut adalah BB dengan skor 72,00, namun realisasi yang dicapai berada pada kategori B dengan skor 70,52. Dengan demikian, persentase capaian untuk sasaran ini adalah 97,94%, yang menunjukkan bahwa meskipun target belum sepenuhnya tercapai, upaya yang dilakukan telah mendekati hasil yang diharapkan.

Nilai evaluasi SAKIP sebesar 70,52 Diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi pada tahun 2025, untuk realiasi capaian Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada tahun 2025 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai capaian 97,94% maka klasifikasi penilaian untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja dapat dikategorikan "**Sangat Tinggi**".

Penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang mengalami penurunan pada beberapa komponen penilaian terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Dimana ringkasannya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3. 28 Hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Komponen Yang Dipilih	Nilai Tahun 2024		Nilai Tahun 2025	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	23.01	30%	23.23
2	Pengukuran Kinerja	30%	18.61	30%	19.68
3	Pelaporan Kinerja	15%	10.02	15%	12.32
4	Evaluasi Internal	25%	14.92	25%	15.29
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	-	-	-	-
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja		100%		100%	
Nilai Hasil Evaluasi Sakip			66.55		70.52

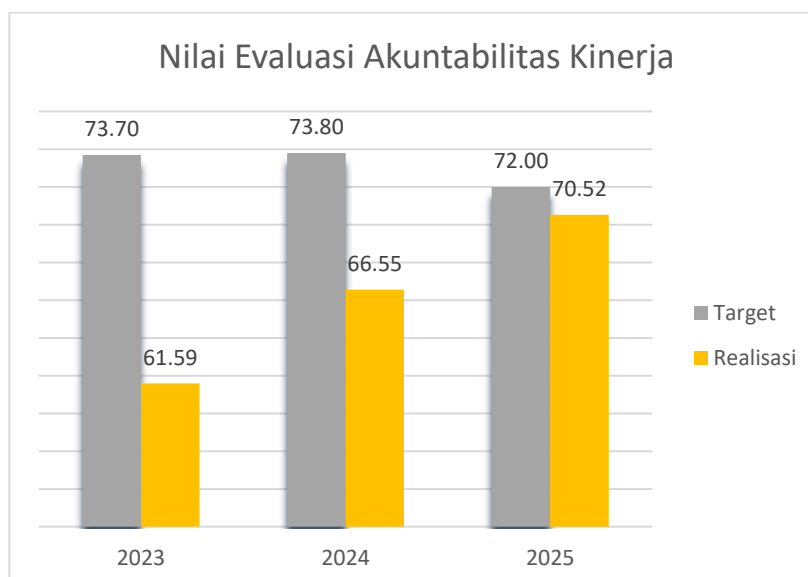
Sumber Data : Hasil Evaluasi Sakip Dinas BMCKTR Tahun 2024 dan 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi tersebut Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 70,52 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73,70 BB	73,80 BB	72,00 BB	61,59 B	66,55 B	70,52 B	83,57	90,18	97,94

Sumber data : Data Kinerja Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat



Gambar 3. 11 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Grafik menunjukkan perbandingan target dan realisasi nilai evaluasi akuntabilitas kinerja selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, realisasi sebesar 61,59 masih berada di bawah target 73,70. Kinerja meningkat pada tahun 2024 dengan realisasi mencapai 66,55, namun tetap belum memenuhi target 73,80. Pada tahun 2025, terjadi peningkatan signifikan, di mana realisasi mencapai 70,52 dan semakin mendekati target 72,00. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan tren positif meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan dan perbaikan berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Dokumen Renstra dan RPJMD. Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja organisasi dengan target Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas s/d 2024 Terhadap Renstra 2021 - 2026

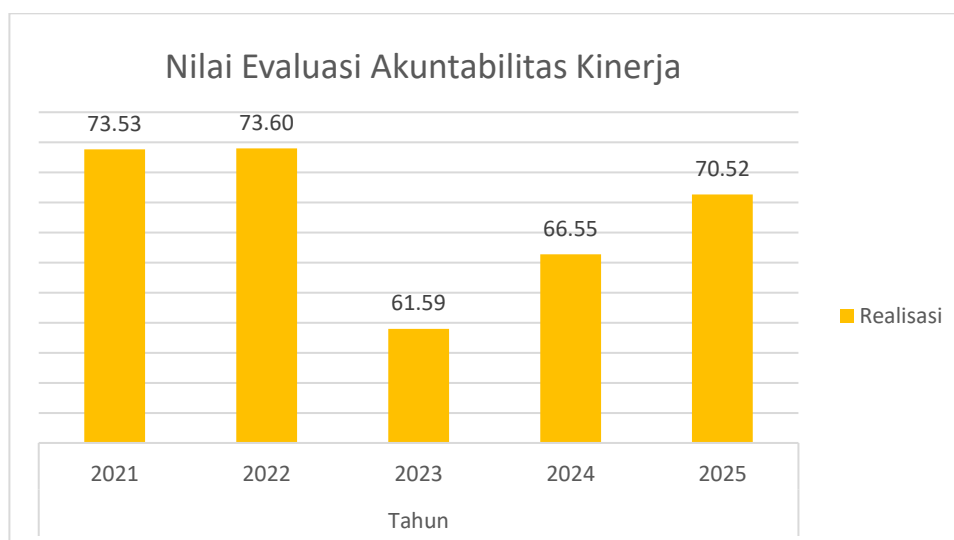
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET s/d 2025	REALISASI s/d 2025	TARGET s/d 2026
(1)	(2)	(3)			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73,90 BB	70,52 BB	74 BB

Tabel tersebut menyajikan perbandingan realisasi dan target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi dalam mendukung

sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026. Hingga tahun 2025, target yang ditetapkan adalah sebesar 73,90 dengan kategori BB, namun realisasi yang dicapai hanya sebesar 70,52 dengan kategori BB. Untuk tahun 2026, ditargetkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja akan meningkat menjadi 74 dengan kategori BB. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 belum mencapai target yang diharapkan, tetapi terdapat upaya untuk meningkatkan capaian di tahun-tahun mendatang.

Untuk perbandingan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan provinsi lain saat ini masih belum kami peroleh karena informasi belum tersedia di website PUPR Provinsi di Pulau Sumatera.

Pencapaian indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 3. 12 Grafik Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2021-2025

Secara umum, grafik menunjukkan pencapaian realisasi yang konsisten dengan target selama dua tahun pertama (2021-2022). Namun, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara target dan realisasi pada tahun 2023 dan 2024, dikarenakan adanya perubahan sistim penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.

Untuk **Meningkatnya Akuntabilitas** telah dilakukan beberapa upaya dan tindak lanjut untuk peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Proses SAKIP dimonitor langsung melalui Biro Organisasi sehingga perbaikan kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.
2. Adanya perbaikan pada dokumen kinerja (LKJ) dan kelengkapan data dukungnya
3. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya.

Disamping Upaya – Upaya yang telah dilakukan untuk **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja** pada tahun 2024, juga terdapat beberapa faktor penghambat pencapaian target tersebut sebagai berikut:

1. Tidak samanya pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memahami sistem akuntabilitas kinerja sehingga membutuhkan waktu khusus untuk menyamakan persepsi di internal Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.
2. Adanya pola pikir yang masih mengukur kinerja berdasarkan output bukan outcome.
3. Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.

Kedepannya Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk melakukan upaya menjaga dan meningkatkan kinerja diantaranya adalah dengan melakukan Rapat dan Koordinasi Internal untuk persamaan persepsi tentang pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 1 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar Rp **278,971,717,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya Meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 31 Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		
		Nilai (Rp.)	%	% Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	278,971,717	243,109,648	87.14	87.14
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	278,971,717	243,109,648	87.14	87.14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140,188,158	129,594,172	92.44	92.44
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21,466,100	17,387,100	81	81
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117,317,459	96,128,376	81.94	81.94

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **278,971,717,-** terealisasi sebesar Rp **243,109,648,-** atau 87,14%. Jika membandingkan antara capaian Sasaran kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian sasaran kinerja Meningkatnya akuntabilitas Kinerja (97,94%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (87,14%) dengan tingkat efisiensi 76,99% yang dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\% \\ &= \frac{(278,971,717 \times 97,94\%) - 243,109,648}{278,971,717} \times 100\% \\ &= 0.11 \end{aligned}$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, Tingkat efisiensi kinerja di konversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= \left(50\% + \frac{\text{efisiensi kinerja}}{20} \right) \times 50 \\ &= \left(50\% + \left(\frac{0.11}{20} \right) \right) \times 50 \\ &= 76,99\% \end{aligned}$$

G. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Pengukuran pencapaian sasaran "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi" mencerminkan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan secara profesional. Sasaran ini diukur melalui satu indikator kinerja, yaitu *Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi*. Data indikator tersebut diperoleh dari hasil survei kepuasan yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen penilaian terhadap kinerja pelayanan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Kuesioner ini diisi oleh berbagai pihak, termasuk rekanan, penyedia, dan konsultan (Bidang/UPTD), serta pegawai Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat (Sekretariat). Penilaian dilakukan berdasarkan pengalaman mereka terhadap layanan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Berdasarkan data kuesioner yang telah diisi melalui aplikasi "Sepakat" di <https://sepakat.sumbarprov.go.id/>, tingkat kepuasan terhadap pelayanan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 mencapai skor 87%. Skor ini termasuk dalam klasifikasi penilaian "Sangat Tinggi" dengan persentase capaian sebesar 120,83% dari target yang ditetapkan, yaitu 89,00%. Penetapan target tersebut mengacu pada hasil capaian tahun sebelumnya. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 32 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85,25%	87%	120,83%

Untuk mengukur Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017, dengan rincian sebagaimana yang ada pada tabel berikut.

Tabel 3. 33 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

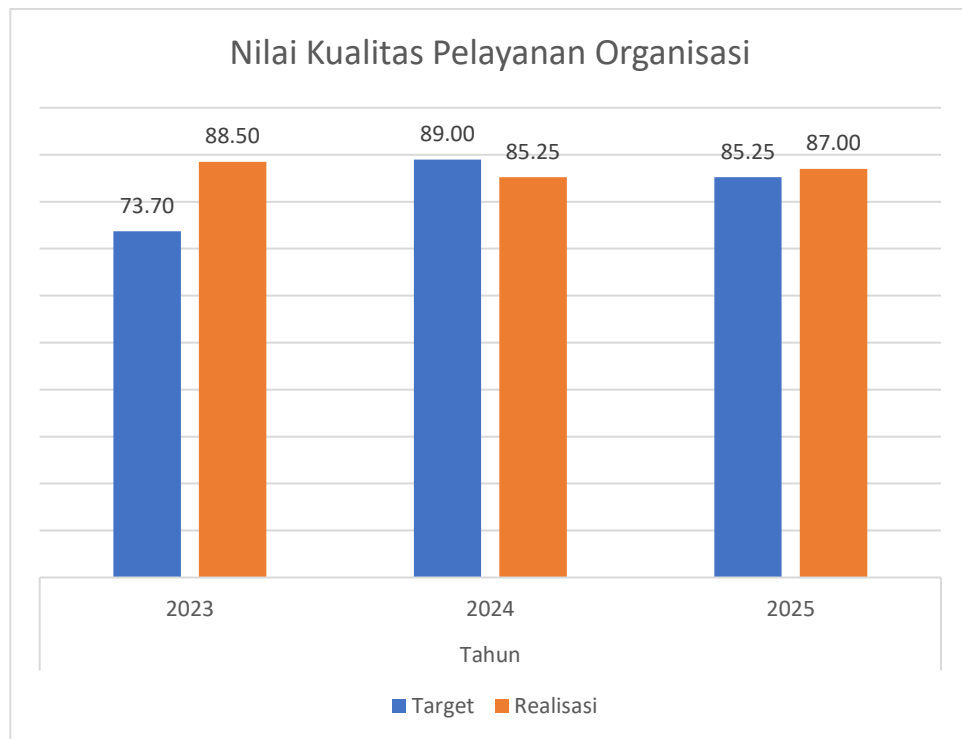
NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00-64,99	D	Tidak Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

Data rekapitulasi hasil kuesioner pelayanan publik untuk penentuan realisasi kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dapat diambil dari <https://sepakat.sumbarprov.go.id/> maka nilai mutu dan kinerja unit pelayanan (berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dikategorikan sebagai B (Baik).

Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu dilakukan untuk menunjukkan capaian yang telah diraih dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Hal tersebut bertujuan untuk memperlihatkan kenaikan atau penurunan capaian. Realisasi kinerja dan capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2023, 2024 & 2025 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 34 Realisasi Kinerja & Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi terhadap tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	73,70	89,00	85,25	88,50	85,25	87,00	120,08	98,78	120,83



Gambar 3. 13 Realisasi Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi terhadap tahun sebelumnya

Nilai kualitas pelayanan organisasi menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan cenderung positif selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, realisasi capaian sebesar 88,50 melampaui target yang ditetapkan sebesar 73,70, menunjukkan kinerja pelayanan yang sangat baik. Namun pada tahun 2024, realisasi menurun menjadi 85,25 dan belum mencapai target sebesar 89,00, Hal ini disebabkan adanya perbedaan perhitungan dari aplikasi “**Sepakat**” di tahun 2024 dengan perhitungan yang dilakukan secara manual ditahun – tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2025, realisasi kembali meningkat menjadi 87,00 dan telah melampaui target sebesar 85,25. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan komitmen organisasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi s/d 2025 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET s/d 2025	REALISASI s/d 2025	TARGET s/d 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	73,90	87,00	74

Berdasarkan Tabel 3.37, indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi hingga tahun 2025 mencatat realisasi sebesar 87,00, yang secara signifikan melampaui target Renstra tahun 2025 73,90. Selisih capaian yang cukup besar ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan organisasi berada jauh di atas standar minimum yang direncanakan, sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam rangka perbandingan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan OPD sejenis dari provinsi lain, Dinas BMCKTR hingga saat ini belum menemukan data pembandingan yang relevan. Keterbatasan ketersediaan data tersebut menyebabkan analisis perbandingan lintas daerah belum dapat dilakukan secara optimal

Perkembangan indikator Dalam lima tahun terakhir juga dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. 14 Grafik Perkembangan Indikator lima tahun terakhir

Grafik pada Gambar 3.14 menunjukkan perkembangan nilai kualitas pelayanan organisasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, capaian realisasi mencapai nilai tertinggi sebesar 90,32, yang mencerminkan kinerja pelayanan organisasi berada pada kategori sangat baik. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 88,50 dan kembali menurun pada tahun 2024 hingga mencapai 85,25. Penurunan nilai pada tahun 2024 disebabkan oleh perubahan metode perhitungan. Sebelumnya, perhitungan dilakukan secara manual, tetapi pada tahun 2024 metode tersebut berganti menggunakan aplikasi SEPAKAT. Pergantian ini memungkinkan hasil perhitungan menjadi lebih akurat dan objektif, meskipun menghasilkan angka yang lebih ketat dibandingkan metode manual sebelumnya. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan akuntabilitas dalam penilaian kualitas pelayanan organisasi. Pada tahun 2025, nilai realisasi kembali meningkat menjadi 87,00, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi capaian, tren kinerja masih menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif tinggi dan menegaskan perlunya upaya penguatan berkelanjutan agar kualitas pelayanan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara konsisten.

Adapun **faktor pendukung** tercapainya target kinerja untuk Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi ialah sebagai berikut:

1. Telah terlalankannya tupoksi pada masing-masing Bidang/UPTD maupun Sekretariat dengan baik dan efisien, sehingga program/kegiatan yang dilakukan bersama rekanan, penyedia serta kebutuhan pegawai dapat diayomi dengan baik.
2. Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat telah mampu mengelola dan membekali aparat menjadi sumber daya insan yang dimiliki sehingga dapat menyampaikan pelayanan yang prima

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan Target Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap

Pelayanan Organisasi sesuai dengan apa yang direncanakan, juga terdapat beberapa **faktor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja tersebut adalah adanya perekaman NIK pada saat pengisian Survei di aplikasi Sepakat yang menyebabkan Sebagian Rekanan/ penyedia, dan konsultan enggan mengisi Survei.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 5 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar Rp **56,811,410,237,-** Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 36 Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		
		Nilai (Rp.)	%	% Capaian
Uraian				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	56,811,410,237	55,290,284,947	97.32	97.32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37,864,788,899	37,142,030,235	98.09	98.09
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35,903,109,596	35,327,384,035	98.4	98.4
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,911,679,303	1,766,441,500	92.4	92.4
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50,000,000	48,204,700	96.41	96.41
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	191,272,500	185,630,180	97.05	97.05
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	191,272,500	185,630,180	97.05	97.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	620,760,000	590,484,742	95.12	95.12
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	620,760,000	590,484,742	95.12	95.12
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,870,751,119	1,857,494,375	99.29	99.29
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,250,000	15,920,185	97.97	97.97
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127,596,450	127,536,783	99.95	99.95
Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD Workshop dan Peralatan]	5,000,000	4,896,500	97.93	97.93
Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	3,750,000	3,721,500	99.24	99.24

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		
		Nilai (Rp.)	%	% Capaian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	3,750,000	3,666,800	97.78	97.78
Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	3,750,000	3,734,200	99.58	99.58
Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	6,963,400	6,940,100	99.67	99.67
Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	6,915,450	6,907,050	99.88	99.88
Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	3,750,000	3,703,750	98.77	98.77
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97,804,818	90,695,446	92.73	92.73
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD Workshop dan Peralatan]	2,500,000	2,499,900	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30,500,000	30,320,000	99.41	99.41
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	956,512,000	955,078,701	99.85	99.85
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD Workshop dan Peralatan]	127,162,177	127,006,105	99.88	99.88
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	43,099,300	42,812,850	99.34	99.34
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	49,993,000	49,975,396	99.96	99.96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	38,879,500	38,852,950	99.93	99.93
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	77,891,199	77,336,757	99.29	99.29
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	44,648,000	44,627,304	99.95	99.95
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	82,724,000	82,645,070	99.9	99.9
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14,790,250	14,119,528	95.47	95.47
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	126,521,575	124,497,500	98.4	98.4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	298,555,000	295,662,631	99.03	99.03
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87,515,000	85,428,751	97.62	97.62
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	11,040,000	11,007,280	99.7	99.7
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	200,000,000	199,226,600	99.61	99.61
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,205,500,039	9,569,469,385	93.77	93.84
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,875,000	4,869,900	99.9	99.9

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		
		Nilai (Rp.)	%	% Capaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,154,555,816	1,745,340,498	81.01	81.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD Workshop dan Peralatan]	60,675,000	55,279,485	91.11	91.11
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	16,182,600	10,504,628	64.91	64.91
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	24,127,500	21,308,603	88.32	88.32
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	15,600,000	14,411,049	92.38	92.38
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	10,006,920	9,619,807	96.13	96.13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	21,380,000	19,897,838	93.07	93.07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	43,567,500	37,552,144	86.19	86.19
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,872,273,443	5,749,187,228	97.9	97.9
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD - UPTD Workshop dan Peralatan]	434,766,495	417,799,329	96.1	96.1
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	241,789,990	232,618,176	96.21	96.21
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	276,016,871	265,609,379	96.23	96.23
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	244,623,862	243,573,135	99.57	102.75
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	293,435,646	251,508,432	85.71	85.71
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	244,623,862	244,486,854	99.94	99.94
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	246,999,534	245,902,900	99.56	99.56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,759,782,680	5,649,513,399	98.09	97.87
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	660,395,000	660,183,675	99.97	99.97
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD Workshop dan Peralatan]	86,865,500	85,588,015	98.53	98.53

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		
		Nilai (Rp.)	%	% Capaian
Uraian				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	63,315,000	61,637,020	97.35	97.35
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	72,915,000	45,316,450	62.15	62.15
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	43,990,000	43,379,142	98.61	98.61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	102,973,800	102,921,489	99.95	99.95
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	139,725,305	137,970,930	98.74	98.74
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	224,978,500	221,321,840	98.37	98.37
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar [UPTD - UPTD Workshop dan Peralatan]	675,002,000	672,816,299	99.68	99.68
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	104,501,000	98,160,680	93.93	93.93
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	147,884,500	144,274,225	97.56	97.56
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	99,880,000	96,699,005	96.82	85.78
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	140,528,600	140,408,172	99.91	99.91
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	502,750,000	488,106,371	97.09	97.09
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	3,550,000	3,550,000	100	100

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		
		Nilai (Rp.)	%	% Capaian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	7,710,000	7,704,250	99.93	99.93
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	710,000	710,000	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,429,929,975	2,387,399,890	98.25	98.25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	30,000,000	29,972,278	99.91	99.91
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	40,000,000	39,391,098	98.48	98.48
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	132,178,500	132,174,570	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	50,000,000	49,828,000	99.66	99.66

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **56,811,410,237,-** terealisasi sebesar Rp **55,290,284,947,-** atau 97,32%. Jika membandingkan antara capaian Sasaran kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi (87% %) lebih rendah dari realisasi anggaran (97,32%) dengan tingkat efisiensi 108,77% yang dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\% \\
 &= \frac{(56,811,410,237 \times 97.32\%) - 55,290,284,947}{56,811,410,237} \times 100\% \\
 &= 0.24
 \end{aligned}$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui besaran Tingkat efisiensi, Tingkat efisiensi kinerja di konversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= \left(50\% + \frac{\text{efisiensi kinerja}}{20} \right) \times 50 \\
 &= \left(50\% + \left(\frac{0,24}{20} \right) \right) \times 50 \\
 &= 108,77\%
 \end{aligned}$$

3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	278,971,717	243,109,648	87.14
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	278,971,717	243,109,648	87.14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	56,811,410,237	55,290,284,947	97.32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37,864,788,899	37,142,030,235	98.09
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	191,272,500	185,630,180	97.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	620,760,000	590,484,742	95.12
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,870,751,119	1,857,494,375	99.29
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	298,555,000	295,662,631	99.03
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,205,500,039	9,569,469,385	93.77
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,759,782,680	5,649,513,399	98.09
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	679,938,248	606,070,018	89.14
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	679,938,248	606,070,018	89.14
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1,712,654,800	1,659,745,323	96.91
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1,712,654,800	1,659,745,323	96.91
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	677,149,125	601,838,386	88.88
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	677,149,125	601,838,386	88.88
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	39,164,362,561	37,964,174,734	96.94
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	39,164,362,561	37,964,174,734	96.94
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3,608,785,018	3,344,362,189	92.67
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3,608,785,018	3,344,362,189	92.67
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	241,464,868,800	226,262,725,564	93.7
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	241,464,868,800	226,262,725,564	93.7
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	873,389,261	812,852,320	93.07
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	241,782,850	217,260,524	89.86
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	140,591,500	135,324,685	96.25

LKJIP 2025

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	218,178,711	207,289,660	95.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	272,836,200	252,977,451	92.72
	345,271,529,767	326,785,163,129	

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan cerminan capaian target kinerja dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. Laporan Kinerja disusun berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya. Pada laporan ini, dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis penilaian kinerja secara kuantitatif dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria skala kualitatif sehingga dapat diketahui kinerja program/kegiatan secara kualitatif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada LKjIP ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: dari 9 (Sembilan) program, meliputi: 19 (Sembilan Belas) Kegiatan serta 103 (Seratus Tiga) Sub Kegiatan pada tahun 2023, dari capaian kinerja fisik diketahui bahwa ke 19 (Sembilan Belas) program terlaksana dengan kinerja sangat baik.

Untuk capaian Indikator Kinerja pada tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB 72,00	BB 70,52	97,94%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	85,25%	87,00%	120,83%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	71,00%	71,10%	100,14%
4.	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	88,00%	88,56%	100,64%
5.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi layak	88,00%	88,11%	100,13%
6.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Presentase Bangunan Strategis Terbangun	11,11 %	16,67%	150,04%
7.	Mewujudkan Penataan Ruang Yang Baik Dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan Dengan Program RTRW Provinsi	89,70%	89,70%	100,00%

Secara keseluruhan, kinerja organisasi menunjukkan capaian yang sangat baik dan mayoritas indikator berhasil memenuhi bahkan melampaui target. Pelayanan organisasi, kualitas bangunan strategis, serta pemenuhan akses dasar (air minum dan sanitasi) mencatat kinerja di atas target, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program. Sementara itu, akuntabilitas kinerja organisasi meskipun belum sepenuhnya mencapai target, tetap berada pada kategori baik dan mendekati sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan berjalan selaras dengan perencanaan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan layanan publik dan infrastruktur. Penilaian Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini menjadi salah satu bahan untuk pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi sesuai Penetapan Kinerja yang ada. Kendala-kendala yang dihadapi pada Tahun 2025 dapat dijadikan cermin untukantisipasi pada tahun-tahun berikutnya. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka mewujudkan capaian keuangan lebih baik di masa mendatang antara lain :

1. Mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk persiapan Pengadaan Barang dan Jasa untuk semua paket pekerjaan terutama paket lelang agar pelaksanaan pekerjaan fisik bisa dilakukan lebih awal, sehingga tidak ada lagi paket pekerjaan yang dilaksanakan melewati Tahun Anggaran yang nantinya akan berefek pada rendahnya serapan keuangan seperti yang terjadi pada Tahun 2025 ini.
2. Menempatkan SDM yang berkualitas sesuai dengan kompetensi bidangnya masing-masing sehingga kinerja pelaksanaan kegiatan memberikan hasil yang baik.
3. Meningkatkan monitoring dan pengawasan berlapis dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.